

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

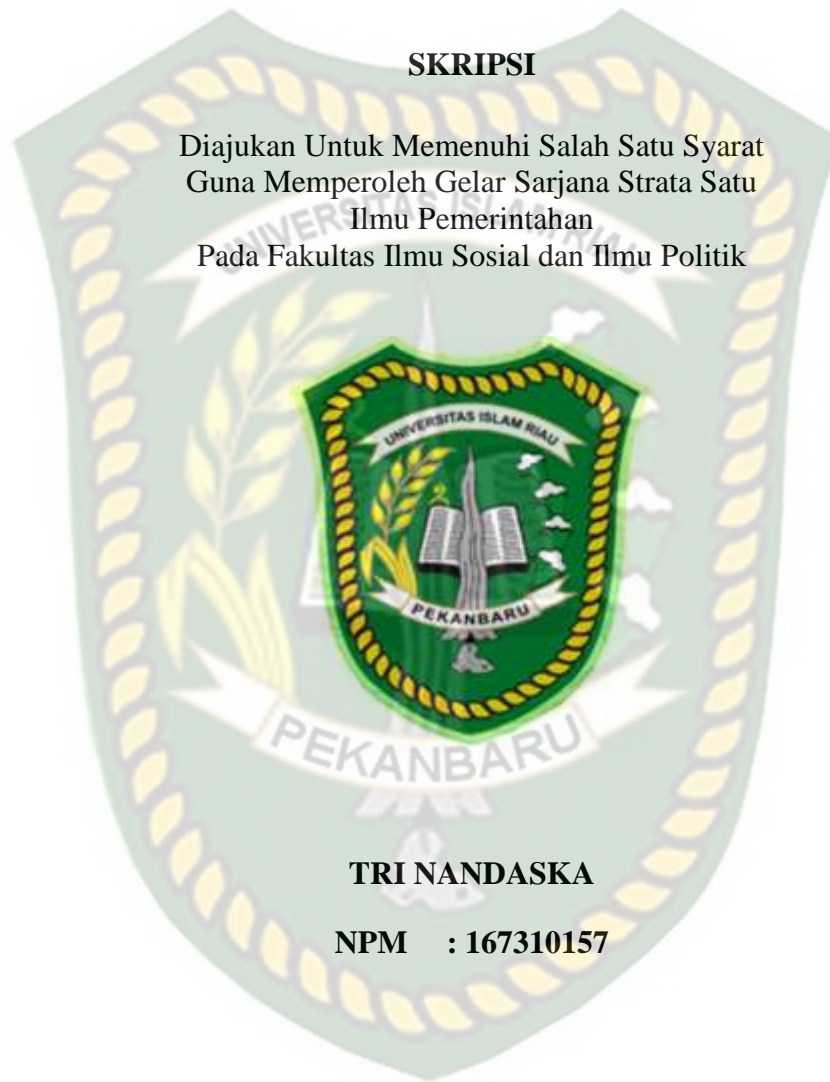
EVALUASI PROGRAM DESA BROADBAND TERPADU DI DESA BOKOR

KECAMATAN RANGSANG BARAT KABUPATEN KEPULAUAN

MERANTI

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



TRI NANDASKA

NPM : 167310157

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2020

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Tri Nandaska
NPM : 167310157
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)
Judul Skripsi : Evaluasi Program Desa Broadband Terpadu di Desa Bokor
Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti

Format sistematika dan pembahasani masing-masing bab dan sub-bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode peneltian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam siding ujian komprehensif.

Pekanbaru, 1 Januari 2020


Turut Menyetujui:

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Pembimbing



Budi Mulianto, S.IP., M.Si



Yendri Nazir, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Tri Nandaska
NPM : 167310157
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)
Judul Skripsi : Evaluasi Program Desa Broadband Terpadu di Desa Bokor
Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti

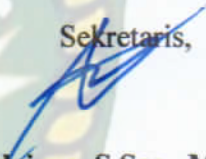
Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konfrehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarja.

Pekanbaru, 10 Maret 2020

Ketua,


Yendri Nazir, S.Sos., M.Si

Sekretaris,


Andriyus, S.Sos., M.Si

Anggota


Dra. Hj. Monalisa., M.Si

Mengetahui,

Wakil Dekan I,


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

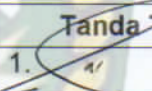
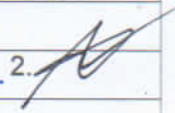


UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor *441*/UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 04 Maret 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 05 Maret jam 08.00 – 09.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Tri Nandaska
NPM : 167310157
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Evaluasi Program Desa Broadband Terpadu Di Desa Bokor Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.**

Nilai Ujian : Angka : " *87.1* " ; Huruf : " *A* "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yendri Nazir, S.Sos., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Andriyus, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Dra. Hj. Monalisa, M.Si.	Anggota	3. 
4.	Rijalul Fikri, S.Sos., MA.	Notulen	4. 

Pekanbaru, 05 Maret 2020
An. Dekan.



Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 049/UIR-FS/KPTS/2020
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 081/UIR/KPTS/2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2016-2020.

- Memperhatikan** : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : **Tri Nandaska**
N P M : 167310157
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Program Desa Broadband Terpadu Di Desa Bokor Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.

1. Yendri Nazir.,S.Sos.,M.Si Sebagai Ketua merangkap Penguji
 2. Andriyus.,S.Sos.,M.Si Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
 3. Dra. Hj. Monalisa.,M.Si Sebagai Anggota merangkap Penguji
 4. Rijalul Fikri.,S.Sos.,MA Sebagai Notulen
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan Di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 04 Maret 2020
An. Dekan

Dr.H. Panca Setvo Prihatin.,S.Ip.,M.Si

Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan Disampaikan Kepada :

- 1.Yth. Bapak Rektor UIR
- 2.Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi IP.....
4. Arsip...SK Penguji ...

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Tri Nandaska
NPM : 167310157
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)
Judul Skripsi : Evaluasi Program Desa Broadband Terpadu di Desa Bokor
Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 10 Maret 2020

An. Tim Penguji

Sekretaris,

Ketua,

Yendri Nazir, S.Sos., M.Si


Andriyus, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua,


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si


Budi Muliando, S.IP., M.S

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT, dengan segala rahmat serta hidayah yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul “ Evaluasi Program Desa Broadband Terpadu Di Desa Bokor Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti”. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik di Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Dalam penyelesaian Skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari semua pihak yang berkompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan Skripsi ini. Dan tak lupa pula penulis ingin menyampaikan ribuan terimakasih kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penulisan ini, terkhususnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau khususnya pada Program Studi Ilmu Pemerintahan.
2. Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Budi Muliando, S.IP., M.Si sebagai Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis sehingga penulisan Skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Yendri Nazir, S.Sos., M.Si selaku pembimbing saya yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini dengan mudah.
5. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan juga asisten Dosen yang telah membeikan banyak ilmu yang pada akhirnya dapat penulis gunakan dalam penulisan Skripsi ini.

6. Kepada Keluarga tercinta, yaitu Ayah (alm), Mama, kakak dan abang saya tercinta juga kepada seluruh saudara-saudara yang senantiasa memberikan motivasi dorongan dan juga senantiasa mendo'akan agar penulis selalu diberikan kemudahan dalam setiap urusannya.
7. Kepada orang terkasih, sahabat, teman dan rekan- rekan yang selalu membantu penulis dalam memahami ilmu-ilmu serta membantu penulis untuk lebih bersemangat dalam menyelesaikan penelitian ini.
8. Kepada Kepala Desa beserta seluruh Perangkatnya dan juga kepada masyarakat yang ada di Desa Bokor, yang selalu memberikan ruang kepada penulis dalam melakukan penelitian di Desa tersebut.

Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya. Dalam penulisan Skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan juga kesalahan. Oleh karena itu besar harapan penulis agar kiranya semua pihak yang membaca Skripsi ini agar memberikan kritik dan masukan yang bersifat membangun, sehingga penulis bisa berkesempatan untuk melakukan perbaikan sebaik mungkin.

Wassalammualaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 1 Januari 2020

Penulis

Tri Nandaska

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFREHENSIF.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRAC.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah.....	17
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	17
1. Tujuan.....	18
2. Kegunaan.....	18
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	19
A. Studi Kepustakaan.....	19
1. Konsep Ilmu Pemerintahan	19
2. Konsep Desa.....	20

3. Konsep Kebijakan	22
4. Konsep Evaluasi	25
5. Konsep E-Government	29
6. Konsep Pembangunan	31
7. Konsep Pemberdayaan	32
B. Penelitian Terdahulu	34
C. Kerangka Pikir	37
D. Konsep Operasional	38
E. Operasional Variabel	41
BAB III : METODE PENELITIAN	42
A. Tipe Penelitian	42
B. Lokasi Penelitian	42
C. Informan dan Key Informan	43
D. Jenis dan Sumber Data	44
E. Teknis Pengumpulan Data	44
F. Teknik Analisis Data	45
G. Jadwal Kegiatan Penelitian	46
BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	47
A. Letak Geografis Daerah Penelitian	47
1. Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Meranti	47
2. Sejarah Singkat Desa Bokor	48
3. Luas Wilayah dan Jarak Tempuh Desa Bokor	49
4. Kondisi Lingkungan	50
5. Visi dan Misi Kepala Desa Bokor Periode 2019-2025	51
6. Kependudukan Desa Bokor	52
B. Struktur Organisasi Kantor Desa Bokor	54
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55

A. Identitas Responden	55
1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	55
2. Identitas Responden Berdasarkan Usia.....	55
3. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	56
B. Evaluasi Program Desa Broadband Terpadu Di Desa Bokor Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti	56
a. Efektivitas Program DBT	58
b. Efisiensi Program DBT	63
c. Kecukupan Program DBT	68
d. Pemerataan Program DBT	72
e. Responsivitas Program DBT	76
f. Ketepatan Program DBT	82
C. Hambatan Program Desa Broadband Terpadu Di Desa Bokor Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti	85
BAB VI : PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88
DAFTAR KEPUSTAKAAN	90

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I.1	Daftar Nama Pengelola Website Desa dan Program DBT	15
II.1	Tabel Judul Penelitian Terdahulu Yang Berkaitan Dengan Program Desa Broadband Terpadu	34
II.2	Konsep Evaluasi Program Desa Broadband Terpadu (DBT) Di Desa Bokor Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti	41
III.1	Jadwal waktu dan kegiatan penelitian Evaluasi Program Desa Broadband Terpadu (DBT)	46
IV.1	Data Perbatasan Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti	47
IV.2	Data Jumlah Kecamatan Di Kabupaten Kepulauan Meranti.....	48
IV.3	Data Jumlah Desa/Kelurahan Di Kabupaten Kepulauan Meranti.....	48
IV.4	Data Perbatasan Wilayah Desa Bokor Dengan Desa Lain.....	49
IV.5	Data Kependudukan Desa Bokor Berdasarkan Usia	53
IV.6	Data Kependudukan Desa Bokor Berdasarkan Gender	53
IV.7	Data Kependudukan Desa Bokor Berdasarkan Pekerjaan	53
V.1	Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	55
V.2	Identitas Responden Berdasarkan Jenis Usia	55
V.3	Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman	
II.1	Evaluasi Program Desa Broadband Terpadu (DBT) Di Desa Bokor Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.....	37
IV.1	Struktur Organisasi Perangkat Desa Bokor.....	54



SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Konferehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tri Nandaska
NPM : 167310157
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Program Desa Broadband Terpadu Di
Desa Bokor Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten
Kepulauan Meranti

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini serta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulis karya ilmiah;
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrative, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa apabila kemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 1 Januari 2020

Pernyataan

Tri Nandaska

**EVALUASI PROGRAM DESA BROADBAND TERPADU DI DESA
BOKOR KECAMATAN RANGSANG BARAT KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI**

ABSTRAK

TRI NANDASKA

Kata Kunci: Evaluasi, Program, dan Program Desa Broadband Terpadu

Program Desa Broadband Terpadu (DBT) merupakan program IT untuk Desa dengan akses yang terkoneksi dengan jaringan internet yang akan selalu tersambung, terjamin akan ketahanan dan keamanan informasinya serta mempunyai kemampuan *Triple Play*. Wilayah pelayanan dari Program ini adalah desa 3T. Program ini berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) dan Badan Prakarsa Pembangunan Desa dan Kawasan (BP2DK). Sumber pembiayaannya berasal dari pendanaan *Universal Service Obligation (USO)*. Mekanisme pelaksanaan program DBT adalah "*Bottom Up*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hasil evaluasi dari pelaksanaan program Desa Broadband Terpadu di Desa Bokor Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti, dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaannya. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, dan Ketepatan. Tipe penelitian ini adalah kualitatif dengan Informan penelitian terdiri dari Kepala Desa, Pandu Desa, Ketua Staff IT, Ketua Sanggar Seni Desa, dan 3 orang masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil analisis menyimpulkan bahwa hasil Evaluasi dari pelaksanaan program Desa Broadband Terpadu di Desa Bokor Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti sudah terlaksana namun belum maksimal. Karena ada beberapa tujuan dasar dari program yang tidak terwujud. Dan juga dalam pemanfaatan program masyarakat masih belum mengetahui secara jelas.

**EVALUATION OF INTEGRATED BROADBAND DESA PROGRAM IN
DESA BOKOR, KECAMATAN RANGSANG BARAT, KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI**

ABSTRACT

Keywords: Evaluation, Program, and Integrated Broadband Desa Program

Integrated Broadband desa Program (DBT) is an IT program for desa with access that is connected to the internet network that will always be connected, guaranteed information security and security and has Triple Play capability. The service area of the Program is 3T Desa. This program comes from the Ministry of Communication and Information together with the Telecommunications and Information Technology Provider and Management Agency (BP3TI) and the Village and Regional Development Initiative Agency (BP2DK). The source of funding comes from Universal Service Obligation (USO) funding. The mechanism for implementing a DBT program is "Bottom Up". This study aims to determine how the results of the evaluation of the implementation of the Integrated Broadband Desa program in Desa Bokor, Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, and to find out the obstacles that exist in its implementation. The indicators used in this study are: Effectiveness, Efficiency. Adequacy, Equity, Responsiveness, and Accuracy. This type of research is qualitative with research informants consisting of the Village Head, Pandu Desa, Chair of the IT Staff, Chair of the Village Art Studio, and 3 community members. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The results of the analysis concluded that the results of the evaluation of the implementation of the Integrated Broadband Desa program in Desa Bokor, Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti had been carried out but not yet maximized. Because there are some basic objectives of the program that are not realized. And also in the use of community programs still do not know clearly.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perluasan pembangunan menjadi salah satu keinginan dan tujuan negara yang hendak dicapai secara penuh. Sebagaimana agenda prioritas pemerintah yang sudah tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2005-2025. Salah satu dari prioritas pembangunan nasional yaitu dengan membangun perluasan Teknologi dan Informatika di Nusantara.

Teknologi dan Informatika merupakan bidang yang berkaitan dengan urusan pemerintahan yaitu Komunikasi dan Informatika. Dimana urusan pemerintahan tersebut masuk dalam urusan pemerintahan konkuren, wajib bukan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Pita Lebar (*Broadband*) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi pemerintah untuk mempercepat pembangunan dibidang komunikasi dan informatika. Pemanfaatan Teknologi dan Informasi khususnya Pita Lebar (*Broadband*) diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing nasional, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Dalam Peraturan Presiden RI No. 96 Tahun 2014 Tentang Rencana Pita Lebar Indonesia 2014-2019, dijelaskan mengenai Pita Lebar. Pita Lebar (*Broadband*) adalah akses yang konektivitas melalui jaringan internet yang selalu tersambung, terjamin akan ketahanan dan keamanan informasinya serta

mempunyai kemampuan *Triple-play* dengan kecepatan akses minimal 2 Mbps (akses tetap) dan 1 Mbps (akses bergerak). Kementerian yang berwenang mengurus bidang ini adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Prioritas Pembangunan Pita Lebar (*Broadband*) difokuskan pada 5 sektor yakni:

a. e-Pemerintahan (G2G dan G2C)

Lebih untuk menghubungkan kepada 4 komponen yaitu : Pemerintah (*Government/G*), dengan masyarakat (*Citizen/C*), dan dunia usaha (*Business/B*), serta internal yaitu pegawai pemerintah (*Employee/E*). Tujuannya adalah untuk mewujudkan layanan pemerintahan yang lebih transparan, responsive dan berkelanjutan. Juga untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyediaan layanan pemerintahan, mempercepat dan memperluas layanan pemerintahan, serta mempererat hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan bisnis. Ada 3 sektor yang dituju yaitu:

1. Sector Birokrasi yaitu dengan menyediakan sarana dan prasarana berupa jaringan dan pusat data pemerintahan yang aman dan digunakan bersama oleh seluruh instansi pemerintah, mendorong penguatan kelembagaan pengelola TIK di setiap instansi pemerintah, dan mendorong terjadinya transformasi proses bisnis.
2. Sector Keuangan yaitu dengan menyediakan koneksi berkecepatan tinggi yang menghubungkan 29.000 satuan kerja untuk mendukung penggunaan system aplikasi keuangan tingkat instansi (SAKTI) dalam

rangka Implementasi System Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).

3. Sector Pemerintahan Daerah yaitu dengan memperkuat hubungan desa dengan daerah, daerah dengan pusat melalui pengembangan e-Pemerintahan antara lain pembangunan jaringan komunikasi pemerintah, serta mendukung implementasi *ICT Grand Design* yang saat ini sedang disusun oleh Kementrian Dalam Negeri.

b. e-Kesehatan

Program ini lebih diharapkan agar dapat memberikan bentuk pelayan kesehatan, keselamatan serta keamanan dasar secara cepat untuk diakses masyarakat. Dengan memberikan layanan yang memudahkan masyarakat desa untuk menghubungi pihak terkait secara *real-time*. Termasuk ketika ada isu kesehatan dan juga bencana alam. Selain itu tujuan sector ini adalah agar dapat memberikan konsultasi dan pendampingan jarak jauh kepada semua Pusat Kesehatan Masyarakat yang tersebar di seluruh Indonesia langsung dari Dokter atau Ahli Medis yang berkualitas. Hal ini dinilai akan lebih menghemat biaya dan waktu bagi masyarakat desa karena permasalahan kebanyakan adalah akses desa dengan Pusat Kesehatan yang terbilang jauh, sehingga untuk berobat atau berkonsultasi akan membutuhkan biaya dan memakan waktu yang cukup banyak.

c. e-Pendidikan

Ditujukan untuk pemerataan kualitas Pendidikan di seluruh wilayah Indonesia melalui distribusi dan pertukaran materi ajar, serta peningkatan

kualitas proses belajar mengajar melalui eksplorasi informasi dan virtualisasi materi ajar. Maka dari itu diperlukan konektivitas yang kuat dan berkecepatan tinggi. Permasalahan paling besar yang mendasari sasaran ini dikarenakan keterbatasan jaringan pita lebar ke sekolah dan perguruan tinggi, focus belum menyentuh pemanfaatan TIK dan keterbatasan ruang kapasitas penyimpanan data yang terlalu besar. Selain itu sasaran sector ini ditujukan agar lebih bisa membuka cakrawala anak-anak desa terhadap dunia luar hanya dengan memanfaatkan TIK.

d. e-Logistik

Berkenaan dengan informasi yang akurat tentang ketersediaan bahan pokok makanan atau industry yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat seperti kebijakan akan keperluan ekspor dan impor, mengatasi kelangkaan suatu barang serta kebutuhan armada pengangkut logistic. Pitalebar akan memantau dan memberikan informasi berupa data atau informasi lainnya secara terus menerus dalam kapasitas yang besar sehingga mempercepat proses logistic. Dukungan Pitalebar dengan memberikan konektivitas yang berkecepatan tinggi untuk pemantauan persediaan dan harga komoditas ekspor dan impor, pelaksanaan promosi ekspor secara *Daring*, dan mendorong pemerintah daerah untuk mempermudah proses perizinan secara *Daring*.

e. e-Pengadaan

Lebih kepada untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki

tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit, dan memenuhi kebutuhan akses informasi waktu sesaat (*real-time*). Untuk itu diperlukan konektivitas yang tinggi dan system keamanan yang handal. Bentuk dukungan Pitalabar adalah dengan memperkuat *e-market* dengan menghubungkan seluruh layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) serta mendorong proses rekayasa bisnis untuk mendorong *e-market*.

Sejalan dengan Peraturan Presiden diatas, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengeluarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 25 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika. Program-program kewajiban pelayanan universal terdiri dari beberapa program, diantaranya merupakan program prioritas yaitu *Desa Dering*, *Desa Pinter*, *Pusat Layanan Internet Kecamatan*, dan *Desa Broadband Terpadu*. Rencana Pita Lebar (*Broadband*) merupakan salah satu dari bagian Kewajiban Pelayanan Universal. Dalam Pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa wilayah Pelayanan Universal sebagaimana dimaksud mencakup:

- a. Tertinggal, terpencil dan/atau terluar
- b. Perintisan
- c. Perbatasan
- d. Tidak layak secara ekonomis
- e. Daerah lainnya yang masih membutuhkan sarana dan prasarana IT

Desa Dering adalah Program kewajibab Pelaksanaan Universal (KPU) yang dimulai dari 2009-2010. Program ini merupakan program yang terfokus untuk membangun desa pinggiran yang minim akan ketersediaan jaringan telephone dengan menyediakan fasilitas telephone umum. Kominfo bersama pihak swasta

(PT. Telkomsel) akan membangun titik-titik desa yang akan dipasang jaringan telephone. Dengan tujuan tidak ada lagi daerah-daerah di Indonesia ini yang tidak memiliki akses komunikasi.

Desa Pinter, merupakan program lanjutan dari *Desa Dering*. Dimana program ini selain memiliki layanan dering juga akan dilengkapi dengan perangkat computer dan akses internet.

Pusat Internet Kecamatan, adalah program KPU juga dengan target program lebih kepada kecamatan-kecamatan dalam kabupaten/kota yang belum mendapatkan infrastruktur IT. Program ini biasa disebut dengan *Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan*. Dalam program ini, setiap kecamatan yang minim akses informasi, akan difasilitasi berupa internet sekaligus server yang langsung terkoneksi dengan pusat kabupaten/kota.

Desa Broadband Terpadu adalah lanjutan dari program-program sebelumnya dimana target utama lebih kepada desa 3T. Dengan dilengkapi perangkat, dan akses internet sekaligus server berupa aplikasi yang diperuntukkan untuk desa nelayan, pertanian dan pedalaman. Tujuan agar dapat meningkatkan perekonomian dengan memanfaatkan TIK.

Rencana Pita Lebar ini tidak hanya akan dirasakan oleh pemerintah dan masyarakat saja, melainkan akan melibatkan pihak swasta dalam mewujudkannya. Dimana peran pihak swasta adalah sebagai penyedia jaringan dan aplikasi-aplikasi yang diperuntukkan untuk sasaran program yaitu desa dan masyarakat desa. Aplikasi yang dibuat harus sesuai dengan tujuan dari program *Broadband*.

Selain dari pihak-pihak yang telah penulis uraikan sebelumnya, kominfo juga membuka peluang bagi penyedia aplikasi dari pihak masyarakat local, komunitas atau kelompok-kelompok tertentu yang mahir dalam membuat aplikasi. Artinya kesempatan ini terbuka lebar bagi para penyedia dan pengembang aplikasi program dari local melalui <http://sidepi.info>.

Pada portal tersebut tersedia berbagai macam aplikasi yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk desa seperti M-Fish, I-Kios, Email Zohib, Zohib Massanger, Layer Farm, Sorot, dan lainnya. Selain aplikasi tersebut, pengembang aplikasi juga diberikan kebebasan untuk memasukkan aplikasi selain aplikasi utama (Nelayan, Petani, dan Pedalaman/perhutanan) seperti aplikasi kesehatan, office, hiburan, pendidikan dan game yang bersifat mendidik dan memberdayakan masyarakat khususnya masyarakat pedesaan. Bagi para pengembang aplikasi yang ingin berkontribusi dalam program tersebut, dapat mengirimkan proposal melalui alamat e-mail desabroadband@zohib.com / less001@kominfo.go.id (Sumber : *Kominfo*).

Untuk mewujudkan tujuan negara tentu dilakukan oleh setiap elemen dari pemerintahannya, mulai dari pemerintahan pusat hingga ke pemerintahan desa termasuk didalamnya mengikutsertakan masyarakat.

Berdasarkan Permendagri No. 30 Tahun 2006 mengenai Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa, pada pasal 2 jelas dikatakan bahwa urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang dapat diserahkan pengaturan dan penyelenggaraannya kepada Desa tepatnya yang berkaitan dengan Program DBT adalah:

1. Bidang penerangan, informasi dan komunikasi
2. Bidang pemberdayaan masyarakat desa

Penyerahan urusan tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam Permendagri No. 30 Tahun 2006 pada pasal 3 mengenai sistematika tata cara penyerahan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan Permendagri No 56 Tahun 2015 Tentang Kode dan data wilayah administrasi pemerintahan disebutkan jumlah desa dan kelurahan di Indonesia adalah 83.184. Terdiri dari 74.754 Desa dan 8.430 Kelurahan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) dikatakan Daerah Kabupaten/Kota dibagi atas Kecamatan dibagi atas Kelurahan dan/atau Desa.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, pada pasal 11 dijelaskan bahwa urusan pemerintah wajib bukan pelayanan dasar dan berkaitan dengan Program DBT adalah :

1. Pemberdayaan masyarakat dan Desa
2. Komunikasi dan Informasi

Didalam Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 yang dikatakan dengan Desa adalah desa/desa adat atau yang disebut dengan sebutan nama lain, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah yang berwenang dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul desa, serta hak tradisioal yang diakui juga dihormati dalam system pemerintahan NKRI.

Saat ini persoalan pemerataan infrastruktur masih menjadi suatu permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Khususnya di desa, kesenjangan infrastruktur masih banyak kita temukan. Salah satunya mengenai kesenjangan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Seperti yang kita ketahui bersama, saat ini kemajuan dari segi teknologi sudah sangat pesat. Bukan hanya masyarakat perkotaan saja yang dapat menikmati serta mampu mengoperasionalkannya, tetapi masyarakat yang berdomisili di pedesaan juga sejatinya mempunyai hak yang sama dengan yang lainnya. Hanya saja permasalahan yang ada terkait infrastruktur membuat timbulnya perbedaan kemajuan dan kecerdasan sumber daya manusia.

Pemanfaatan teknologi sebetulnya akan sangat memberikan pengaruh besar terhadap kemajuan suatu daerah. Berbagai macam kegiatan atau aktivitas yang dapat dilakukan untuk mendukung suatu capaian yang dikehendaki. Mulai dari wilayah-wilayah yang kecil, hingga wilayah yang besar pasti membutuhkan tunjangan infrastruktur yang lengkap guna keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahannya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dibuatlah suatu kebijakan dari pemerintah melalui suatu program yang diperuntukan kepada desa-desa yang ada di Indonesia. Salah satu program tersebut adalah Program Desa Broadband Terpadu (DBT). Dimana program tersebut disesuaikan berdasarkan Rencana Strategis Pembangunan Pita Lebar (*Broadband*) dengan penetapan wilayah kerja ke unit pemerintah terkecil yaitu Desa.

Program yang berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) dan BP2DK (Badan Prakarsa Pembangunan Desa dan Kawasan) ini sudah diselenggarakan di 50 desa yang tersebar di berbagai Provinsi sejak 2015, dan difokuskan untuk daerah 3T, yaitu Terluar, Terpencil dan Tertinggal. Penentuan lokasi penerapannya berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Perbatasan Nomor 1 Tahun 2015 (*Sumber: Humas BP3TI*).

Desa Broadband Terpadu (DBT) merupakan salah satu program prioritas untuk desa, dengan menyediakan layanan akses internet, perangkat pengguna, serta aplikasi yang akan disesuaikan dengan karakteristik penduduk desa untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh desa terpilih. Pendanaannya berasal dari kontribusi dana *Universal Service Obligation (USO)*. *Universal Service Obligation (USO)* adalah bagian dari kewajiban pemerintah dalam memenuhi pelayanan universal di bidang Telekomunikasi dan Informatika, guna mengurangi tingkat kesenjangan digital di daerah-daerah terkhusus di kawasan perdesaan. Mekanisme pelaksanaannya adalah “*Bottom up*”, yaitu dari daerah ke pusat. Melalui BPPPTI, tunjangan berupa alat-alat atau perangkat TIK dan jaringan internet beserta website desa akan dihibahkan kepada desa. Program ini bisa membantu desa-desa yang memiliki perbedaan dari segi karakteristik, untuk mendukung aktifitas masyarakatnya. Seperti, desa nelayan, desa pertanian, dan desa pedalaman agar lebih mudah dalam mengoptimalkan Teknologi dan Informasi serta komunikasi didaerahnya. (*sumber : Kementerian Komunikasi dan Informatika 2015*).

Program ini, diharapkan dapat meningkatkan pembangunan desa agar menjadi desa yang lebih kreatif, maju dari segi TIK, mandiri dan mampu bersaing dalam peningkatan potensi desa yang dimilikinya. Berangkat dari permasalahan kesenjangan TIK yang dimiliki oleh desa, tentunya kebijakan pemerintah dengan membuat suatu program seperti ini sangat memberi dampak baik kepada masyarakat. Yaitu dengan internet desa masyarakat akan lebih mudah untuk mendapatkan informasi seputar kesehatan, Pendidikan, perkembangan ekonomi, ketersediaan kebutuhan pokok, mudah berkomunikasi, menjadikan akses promosi desa beserta kearifan local dengan cepat dan efisien, menjadikan masyarakat lebih kreatif dan berwawasan, dan lain sebagainya.

Pelaksanaan program DBT didasari pada hasil evaluasi Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika KOMINFO RI berdasarkan data desa dan usulan dari pemerintahan daerah. Kominfo akan bekerjasama dengan pihak swasta dalam memberikan penyediaan jaringan kepada desa-desa target program. Supaya pelaksanaannya berkesinambungan dan bermanfaat secara penuh, maka pembangunan DBT di setiap lokasi atau desa-desa yang terpilih harus diiringi dengan komitmen bersama dari Kominfo, Pemerintahan Daerah, Swasta, dan masyarakat.

Bupati/Walikota akan menentukan atau mengusung desa-desa yang dianggap mampu dan sesuai untuk menjalankan program desa tersebut. BP3TI bersama pihak swasta (bergerak dibidang Telekomunikasi) akan meninjau desa-desa yang dianggap layak untuk mendapatkan program DBT ini. Desa yang terpilih akan menjalankan dan menerapkan program tersebut dibawah pembinaan dan

pengawasan langsung dari Pemerintah Daerah dan Kominfo melalui BP3TI. Penyediaan sarana dan prasarana dan disertakan pembiayaan pelaksanaan program berasal dari Kominfo melalui BP3TI, sementara ketersediaan jaringan akan diberikan oleh pihak swasta yang bergerak dibidang telekomunikasi. Dalam hal ini desa berkedudukan sebagai penyelenggaraan pemerintahan di desa dengan tugas pembantuan.

Adapun tujuan dari Program tersebut adalah :

1. Mengoptimalkan produktivitas mata pencaharian mayoritas masyarakat pada daerah pesisir, pertanian, dan pedalaman melalui pemanfaatan TIK.
2. Mengoptimalkan harga jual hasil produksi masyarakat melalui pemanfaatan TIK.
3. Mengubah pola pelayanan desa menjadi berbasis TIK.
4. Mengoptimalkan kualitas hidup masyarakat pada bidang kesehatan, Pendidikan, keamanan, dan komunikasi melalui pemanfaatan TIK.

(Sumber Humas BPPPTI, Kominfo RI).

Adapun Output yang didapatkan dari pelaksanaan program ini adalah :

1. Bagi pemerintahan desa :
 - Membangun wawasan Kepala Desa mengenai platform tata kelola desa berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang mampu mendorong kepala desa untuk memiliki visi kemandirian desa.
 - Membentuk Pendamping Desa yang akan membantu dan mendampingi pemerintah desa agar mampu mengetahui dan

memahami platform tata kelola desa yang terpadu dan berkelanjutan dalam skema pembangunan.

- Meningkatkan kapasitas Pendamping Desa untuk memahami dan mengetahui platform tata kelola desa yang terpadu dan berkelanjutan dalam skema pembangunan nasional berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- Melakukan proses pendampingan dalam rangka pemberdayaan pemerintah desa guna memahami dan mengetahui platform tata kelola desa.
- Menginisiasi pola dan bentuk-bentuk kerja yang efektif, serta melakukan evaluasi platform tata kelola desa secara partisipatif untuk mewujudkan platform tata kelola desa sebagai cikal-bakal percontohan *One map, one data* berbasis desa dalam konteks nasional.
- Memberikan masukan terkait platform tata kelola desa yang berguna untuk pelayanan masyarakat untuk memperkuat penerapan *e-government* di desa.

2. Bagi masyarakat desa :

- Membuka cakrawala masyarakat desa terhadap perkembangan dunia luar melalui pemanfaatan teknologi dan informatika mulai dari aspek Pendidikan, kesehatan, hukum dan lain sebagainya.
- Mendorong serta memberikan edukasi secara personal terhadap dunia ekonomi sehingga dapat menciptakan masyarakat desa yang kreatif, mandiri dan memiliki daya saing terhadap kemajuan ekonominya.

- Memberikan kemudahan bagi masyarakat yang bermata pencaharian local di desa seperti nelayan, petani dan perkebunan dalam memaksimalkan pendapatan mereka melalui pemanfaatan fasilitas-fasilitas dan sarana serta prasarana yang disediakan program, sehingga dapat menciptakan kemandirian dan rasa percaya diri secara individual atau kelompok.

Di Kepulauan Meranti ada 2 desa yang terpilih menjadi Desa Broadband yaitu Desa Tanah Merah di Kec. Rangsang Pesisir dan Desa Bokor. di Kec. Rangsang Barat. Kedua desa tersebut terpilih karena didesa tersebut terdapat kendala jaringan internet dan berdasarkan letak strategisnya, kedua desa tersebut merupakan desa yang letaknya paling pinggir. Untuk itu BP3TI dan BP2DK bekerjasama dengan Kemkominfo memberi program Desa Broadband Terpadu kepada kedua desa ini.

Untuk menerapkan Program DBT di Desa terpilih, sebelumnya Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti terikat perjanjian kerjasama dengan Kominfo. Perjanjian kerjasama tersebut dalam bentuk tertulis sebagai acuan dalam pelaksanaan Program DBT di Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti. No. 1341/Kominfo/DJPPI/KS.01.03/09/2015. Perihal tatacara pelaksanaan teknis hingga pembiayaan dijelaskan didalam surat perjanjian kerjasama tersebut.

Desa Bokor adalah salah satu desa yang terletak di kec. Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti yang sudah menerapkan program DBT sejak tahun 2017. Program DBT yang diterapkan di desa ini bersesuaian dengan karakteristik mayoritas penduduk sebagai petani dan nelayan. Program ini masih berjalan

hingga saat ini. Dalam menjalankan program DBT di Desa Bokor, Kepala Desa akan membentuk Perangkat Desa yang berkompeten dibidang Teknologi Informasi. BP3TI akan membuat atau melaksanakan pelatihan SDM terlebih dahulu untuk membentuk Pandu Desa yang akan membantu Kepala Desa dalam menerapkan Program DBT di desa.

Kepala Desa akan menunjuk Ketua Operator IT untuk Program Desa Broadband Terpadu, dan akan membentuk staf-staf yang akan membantu Kepala Desa dalam menerapkan serta menjalankan Program tersebut. Hal ini sesuai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Desa No. 3 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Pengelola Website Desa Bokor Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti. Dan penetapan Penyuluh Desa yang akan membantu pemerintah desa dalam menjalankan program DBT, Sebagaimana beriring dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Desa No. 4 Tahun 2016 Tentang Penetapan Penyuluh Desa Broadband Terpadu Desa Bokor Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti.

Tabel I.1 : Daftar Nama Pengelola Website Desa dan Program DBT

NO	NAMA	JABATAN BIDANG DALAM TIM
1	Yustami	Penyuluh Desa
2	Abdillah Hatta, S.Pd	Ketua Pengelola Website
3	M. Solihin	Dokumentasi / anggota
4	Rasda Lina, S.IP	Administrasi / anggota

Sumber : Arsip Kantor Desa Bokor.

Keberhasilan program juga tergantung dari kecocokan lokasi penerapan program tersebut. Dimana capaian lokasi ditentukan berdasarkan kesepakatan dari

pihak pengusung program dan Pemda. Desa Bokor adalah desa dengan penerangan listrik yang hanya didapati masyarakat pada malam hari saja. Tentunya hal ini menjadi permasalahan dalam kesiapan sarana dan prasarana untuk menjalankan program digital seperti DBT. Karena pengoperasian alat telekomunikasi berbasis online sejatinya memerlukan tenaga listrik yang memadai.

Sebagai sasaran dari Pelaksanaan Program Desa Broadband Terpadu (DBT) juga sejatinya harus memiliki kemampuan dalam menjalankannya. Maka dari itu perlu adanya sosialisasi terhadap bentuk kebijakan apa yang nantinya akan diterapkan atau dijalankan di wilayah tersebut agar dalam pelaksanaannya dapat lebih efektif dan efisien. Juga agar tujuan-tujuan dari kebijakan atau program tersebut dapat tercapai dengan baik. Dalam pelaksanaannya melibatkan setiap elemen-elemen yang dianggap berkaitan dengan program yang hendak dijalankan dan bersesuaian dengan tujuan serta kemampuan daerah sasaran program.

Alasan penulis mengambil lokasi penelitian di Di Desa Bokor adalah karena penulis ingin mengevaluasi program DBT yang sudah dijalankan di desa tersebut. Dengan berbagai fenomena yang dapat penulis uraikan. Adapun fenomena-fenomena tersebut adalah:

1. Terindikasi masih ditemukannya permasalahan sarana penunjang Program seperti listrik. Listrik di desa ini hanya bisa didapati masyarakat dari pukul 17.00-06.00 WIB. Padahal jam kerja atau jam aktivitas masyarakat mayoritasnya dimulai dari pagi hari hingga

petang. Sementara penggunaan IT Seharusnya didukung oleh kelengkapan listrik yang full 24 jam.

2. Terindikasi masih kurangnya sosialisasi program yang dibuktikan dengan ditemukannya masyarakat desa yang belum mengetahui program DBT itu seperti apa dan bagaimana penerapannya serta seberapa bermanfaatnya program tersebut bagi masyarakat desa.
3. Layanan Program DBT belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh masyarakat desa, karena yang mampu mengoperionalkannya masih dari pihak pemerintah desa. Seperti perangkat desa dan staff IT yang ada didesa. Serta penggunaan internet belum sepenuhnya dituju untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Selain itu permasalahan jarak kemampuan Wifi yang terbatas sehingga masyarakat sedikit sukar untuk mengakses nternet. Dan harus rela datang ke titik wifi desa atau menggunakan paket pribadi dari rumah masing-masing. Sehingga program ini tidak sepenuhnya dapat dirasakan masyarakat desa secara gratis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “ *Bagaimana hasil pelaksanaan Program Desa Broadband Terpadu di Desa Bokor Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti?'*”.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui hasil Program DBT yang ada di desa Bokor, Kec. Rangsang Barat Kab. Kepulauan Meranti.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ada dalam penerapan Program DBT di desa Bokor, Kec. Rangsang Barat Kab. Kepulauan Meranti.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Guna Teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memacu perkembangan pengetahuan masyarakat dalam program Desa Broadband, serta peran serta dari pemerintah desa dalam program tersebut khusus ilmu pemerintahan
- b. Guna Akademis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai salah satu bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis lainnya
- c. Secara Khusus, sebagai pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis selama menuntut ilmu diperkuliahan.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN

A. Studi Kepustakaan

Untuk memperjelas konsep penelitian ini, maka penulis mengaitkan beberapa pendapat dan teori sesuai dengan judul penelitian. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan dihubungkan pada pemerintahan.

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Sebelum melangkah lebih jauh dalam memecahkan permasalahan, maka diperlukan teori dari pemerintahan itu sendiri agar mempermudah penulis dalam memperoleh hasil-hasil yang lebih objektif.

Menurut Budiarto (2008:21) menjelaskan bahwa pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berdasarkan dasar Negara. Rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut.

Pemerintahan merupakan sebuah organisasi atau biasa disebut dengan Lembaga yang diberikan legitimasi oleh rakyat sebagai pemegang kekuasaan dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah.

Menurut Ndraha T (2003:45) Pemerintahan merupakan suatu cara yang dilakukan dalam pemenuhan kebutuhan manusia, sebagai bentuk pelayanan public atau pelayanan sipil.

Penyelenggaraan pemerintahan tidak lain adalah dengan menjalankan fungsi-fungsi seperti fungsi legislative, fungsi eksekutif dan fungsi yudikatif.

Pelaksanaan ketiga fungsi tersebut harus disesuaikan dengan kewenangan yang dimiliki oleh tiap-tiap Lembaga dan diatur didalam peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan pemerintahan diharapkan focus pada penjagaan kualitas serta kemampuan dari penyelenggaraan tersebut. Pelaksanaannya bertujuan untuk pembangunan dan pemerintahan sekalian pelaksanaan tugas pemerintahan umum.

Menurut (Syafiie, 2007) Ilmu Pemerintahan merupakan suatu kajian ilmu pengetahuan untuk mempelajari bagaimana pelaksanaan koordinasi dan kepemimpinan (legislative, yufikatif, dan eksekutif) antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar Lembaga-lembaga, dalam berbagai persoalan pemerintahan.

Dalam penjelasan Musanef (199:7) Ilmu pemerintahan adalah ilmu untuk dapat menguasai dan memimpin juga menyelidiki unsur-unsur yang ada di dinas yang berhubungan kepada masyarakat dan kepentingan dari masyarakat itu diwakili oleh dinas tersebut.

Lebih lanjut menurut Ndraha (2003:9) Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara untuk memenuhi dan melindungi kebutuhan dari tiap-tiap orang dalam mendapatkan jasa layanan Publik dalam hubungan pemerintahan.

2. Konsep Desa

Desa dalam penyebutan Bahasa India yakni *Swadesi* yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, dan tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan

hidup dengan satu kesatuan norma dan memiliki batas wilayah yang jelas. Soetardjo dalam (Wasistiono, 2007).

Desa merupakan daerah atau wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat (masyarakat hukum) yang memiliki organisasi pemerintahan terendah yang berada langsung dibawah Camat dan berhak untuk menyelenggarakan otonomnya Widjaya (2002:19).

Desa merupakan organisasi pemerintahan terkecil yang menyelenggarakan pemerintahannya berdasarkan apa yang telah ditetapkan dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan lembaga atau organisasi dalam desa yang berfungsi membuat peraturan desa Bersama kepala desa, menampung, menyalurkan dan menyampaikan aspirasi dari masyarakat desa.

Organisasi adalah alat yang digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut dan juga sebagai wadah yang digunakan untuk terselenggaranya administrasi. Money mengatakan dalam Syafiie (2003:113) Organisasi adalah segala wujud dari perserikatan atau perkumpulan orang-orang dalam mencapai tujuan bersama.

Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dikatakan bahwa Desa adalah sebuah kesatuan dari masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya, kepentingan masyarakatnya, serta berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa merupakan Lembaga perpanjangan dari pemerintah pusat yang memiliki peran strategis dalam pengaturan masyarakat desa demi keberhasilan pembangunan nasional. Karena peranannya yang sangat besar, maka diperlukan adanya peraturan-peraturan atau Undang-Undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur tentang pemerintahan desa itu sendiri. Sehingga roda pemerintahan dapat berjalan dengan optimal. Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa beserta perangkat desa, yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.

Dari gambaran tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pemerintah desa mempunyai tugas serta peranan yang sangat penting dalam terlaksananya pemerintah desa yang menyangkut permasalahan pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan nasional, serta membangun dan meningkatkan partisipasi dari masyarakat desa, sehingga pembangunan nasional dapat terwujudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat pedesaan khususnya.

Konsep pemerintah desa dalam buku (Saparin, 1986) menyatakan bahwa Pemerintah Desa merupakan suatu symbol formal dari pada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan dibawah pimpinan seorang Kepala Desa beserta perangkat desa lainnya yang mewakili masyarakat dalam hubungan keluar maupun kedalam desanya.

3. Konsep Kebijakan

Pentingnya Kebijakan (*Policy*) menjadi salah satu ukuran dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan dijadikan sebagai tindakan untuk

memilih dan menunjukkan pilihan terpenting untuk menghadapi suatu persoalan, baik dalam kehidupan pemerintahan maupun dari sudut sector privat. Kebijakan hendaknya bebas dari nuansa-nuansa politik yang sering mencoreng kepercayaan beberapa pihak dikarenakan identic dengan keberpihakan pada yang menguntungkan ataupun karena adanya kepentingan.

Kebijakan merupakan suatu ketetapan yang berlaku yang harusnya bersifat konsisten serta baik dari yang membuatnya ataupun yang menaatinya. Kebijakan public adalah suatu rangkaian berupa pilihan yang akan saling berhubungan termasuk dalam keputusan-keputusan akan keinginan bertindak atau tidak dan dibuat oleh badan atau pejabat pemerintah.

Dalam kebijakan public terbagi secara terperinci kembali pada bagian-bagian yang termasuk didalamnya: tuntutan kebijakan, keputusan kebijakan, pernyataan kebijakan, hasil kebijakan, dan dampak kebijakan. Secara garis besar analisis dari kebijakan public terbagi menjadi tiga bagian yaitu: Tahap-tahap perumusan kebijakan, Implementasi Kebijakan, dan Evaluasi Kebijakan.

Bridgeman dan Davis (2004) dalam Suharto (2008:5-8) menyatakan bahwa kebijakan public akan melahirkan sedikitnya tiga dimensi yang akan saling bertautan dan berhubungan. Yaitu:

1. Sebagai Tujuan (*Objective*)
2. Sebagai Pilihan tindakan yang legal dan sah secara hokum (*Authoritative Choice*)
3. Sebagai Hipotesis (*Hypothesis*)

Menurut Edward III dalam Widodo (2018:12) mengemukakan bahwa Kebijakan publik adalah apa yang pemerintah katakan dan dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-

program pemerintah. Dengan demikian kebijakan sebuah tindakan pemerintah dalam bentuk program-program dalam mencapai tujuan dan sasaran pemerintah.

James E Anderson dalam (Tresiana dan Duadji, 2017:5) mendefinisikan sebagai kebijakan yang dikembangkan atau dirumuskan oleh instansi-instansi atau pejabat-pejabat pemerintah, karenanya implikasi terhadap hakikat kebijakan publik meliputi : Pertama, kebijakan publik merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan. Kedua, tindakan yang saling terkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Ketiga, berkaitan dengan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam bidang-bidang teretntu dan keempat, berbentuk positif dan bisa pula negative.

Ndaraha (2003:98) menjelaskan yang dimaksud dengan kebijakan pemerintah adalah sebagai pilihan terbaik, usaha untuk memproses nilai pemerintahan yang bersumber pada kearifan pemerintahan dan mengikat secara formal, etika, dan moral, diarahkan guna menepati pertanggung jawaban aktor pemerrintahan di dalam lingkungan pemerintahan.

Thomas R. Dye (1992:2-4) mengartikan bahwa kebijakan public merupakan segala sesuatu yang dapat dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah dengan alasan suatu kebijakan tersebut harus dilakukan atau tidak sehingga dapat menjadi pertimbangan yang holistic agar kebijakan tersebut memiliki nilai guna dan manfaat yang besar bagi masyarakat dan juga kebijakan tersebut tidak akan memberi kerugian bagi masyarakat. Dengan kata lain pemerintah dituntut untuk bijaksana dalam membuat suatu kebijakan dengan berorientasi kepada tujuan utama dari adanya kebijakan tersebut.

Kebijakan publik menurut Dye dalam (Widodo, 2018:13) ia mengemukakan bahwa dalam sistem kebijakan terdapat tiga elemen, yaitu (a) kebijakan publik, (b) pelaku kebijakan, dan (c) lingkungan kebijakan.

Kebijakan public dipandang sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dimana kebijakan tersebut terdiri atas segala bentuk pilihan dari pemerintah untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu. Dalam mencapai tujuan dari suatu negara, pemerintah haruslah bijak dalam mengambil suatu keputusan ataupun tindakan yang dapat memberi penyelesaian terhadap permasalahan yang ada. Melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu merupakan suatu kebijakan public.

4. Konsep Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk melihat dan mengukur suatu tindakan atau kebijakan yang dibuat dalam pelaksanaannya beserta segala alasan-alasan kebijakan tersebut dilakukan. Evaluasi juga digunakan untuk melihat sejauh mana penilaian terhadap kinerja yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan, serta mengukur efektif dan efisiensi dari pelaksanaan tersebut.

Evaluasi juga menilai keterkaitan hubungan antara teori yang digunakan dalam kebijakan engan praktik pada pengimplementasian kebijakan dalam pengukuran dampak kebijakan tersebut yang sesuai dengan perkiraan atau tidak. Dari hasil evaluasi kita dapat memberi penilaian terhadap keberhasilan suatu program atau kebijakan yang berjalan sejauh mana dapat memberikan manfaat kepada sasaran kebijakan atau program tersebut.

William Dunn (2011;68), mengartikan bahwa evaluasi ialah penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), serta penilaian (*assasment*) , untuk menganalisa hasil kebijakan tertentu. Dengan kata lain mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.

Nurcholis (2005;169), evaluasi diartikan sebagai suatu proses yang mendasar yang dilakukan untuk mengetahui hasil dari program yang berjalan dalam tahapan waktu. Evaluasi juga dilakukan untuk mengetahui hambatan atau kendala yang dapat terjadi.

Ndraha (2003;201) mengatakan bahwa evaluasi adalah suatu proses membandingkan antara standar dengan fakta serta menganalisis hasilnya seberapa jauh dalam mencapai tujuan yang ada. Ada beberapa model evaluasi, diantaranya yaitu :

1. Model *Before-after*, yaitu membandingkan antara keadaan sebelum dengan sesudah tindakan itu dilakukan, dengan tolak ukur adalah *before*.
2. Model *das solen-dassein*, yaitu membandingkan antara apa yang seharusnya dengan apa yang keadaan yang sebenarnya, dengan tolak ukurnya adalah *das sollen*.
3. Model kelompok *control-kelompok test*, yaitu perbandingan antara kelompok yang ada.
4. *Control* (tanpa perlakuan) dengan kelompok *test* (yang diberi perlakuan), dengan tolak ukurnya adalah kelompok control.

Kriteria penilaian Evaluasi menurut William N. Dunn (2003;429) yaitu:

1. Efektivitas (*Effectiveness*) mencakup bagaimana suatu alternative dapat memenuhi capaian yang hendak dicapai (hasil dengan akibat) sehingga suatu tujuan dapat terpenuhi. Efektifitas dapat diukur dengan rasionalisme teknis, layanan bahkan nilai moneter suatu kebijakan atau program.
2. Efisiensi (*Efficiency*) berkaitan dengan kebijakan yang dilakukan dan dapat memperoleh tujuan efektivitas tertinggi dengan biaya yang ternilai sangat kecil/minim. Efisiensi juga berbicara tentang usaha yang dilakukan juga diperlukan demi menghasilkan suatu tingkat efektivitas.
3. Kecukupan (*Adequacy*) membicarakan tentang seberapa jauh hubungan tingkatan efektivitas dapat memenuhi kebutuhan, nilai, juga kesempatan yang menjadi factor adanya masalah. Dengan kata lain kecukupan berkenaan dengan hubungan efektivitas kebijakan dengan hasil yang diperoleh ataupun suatu upaya yang dilakukan dalam memecahkan permasalahan.
4. Pemerataan (*Equity*) berbicara mengenai perataan dari suatu kebijakan atau program yang adil. Yaitu kebijakan ataupun program dengan adanya pendistribusian dari unit pelayanan dan meneter maupun usaha yang dilakukan.
5. Responsivitas (*Responsiveness*) berkenaan dengan adanya kebijakan atau program yang dilakukan dapat memenuhi kebutuhan , preferensi atau nilai-nilai kelompok tertentu. Serta

dapat menciptakan keterlibatan dari pihak-pihak lain dalam adanya kebijakan ataupun program.

6. Ketepatan (*Appropriateness*) yaitu berhubungan dengan rasionalitas yang substantive. Ketepatan kebijakan atau program yang merujuk kepada nilai-nilai atau harga, dan tingkat kemampuan dari tujuan program.

Ciri-ciri evaluasi menurut Dunn (dalam Nugroho, 2004;186) yaitu:

1. Efektifitas, apakah hasil yang ingin dicapai.
2. Efisiensi, seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
3. Kecukupan, seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan dalam memecahkan masalah.
4. Pemerataan, apakah biaya dan manfaat dapat didistribusikan dengan merata kepada kelompok yang berbeda.
5. Ketepatan, apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna.
6. Responsivitas, apakah hasil kebijakan memutuskan kebutuhan atau nilai kelompok.

Fungsi Evaluasi menurut Wiliiam N. Dunn dalam adalah untuk dapat memenuhi akuntabilitas public karena suatu kebijakan melalui kajian evaluasi harus mampu memenuhi esensi dari akuntabilitas itu, dimana fungsi evaluasi yang dimaksud antara lain:

1. Dapat memberikan eksplanasi yang dapat diterima oleh akal atas realitas dari pelaksanaan suatu program/kebijakan. Dalam hal ini, kajian evaluasi perlu dikaitkan dengan hubungan sebab akibat.
2. Untuk mengukur tingkat kepatuhan. Dalam hal ini evaluasi mampu melihat kesesuaian dari pelaksanaan program dengan standar prosedur yang berlaku.
3. Melakukan auditing guna melihat *ouput* dan *input* dari adanya program atau kebijakan terhadap sasaran yang dituju, terkait ada atau tidaknya kebocoran dan penyimpangan pada penggunaan anggaran, atau ada dan tidaknya penyimpangan pada pelaksanaan program.
4. Evaluasi sebagai akunting untuk melihat dan mengukur seberapa jauh sebab akibat dari social ekonomi dari program atau kebijakan. Misalnya seberapa jauh program dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pendapatan, dan dampak yang ditimbulkan.

5. Konsep E-Government

E-Government merupakan suatu pemanfaatan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam melaksanakan kegiatan pemerintah agar lebih ternilai efisien dan murah. Seperti meningkatkan pelayanan masyarakat dengan cara menyediakan sarana public sehingga masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan informasi. Selain itu, *e-government* juga dapat digunakan untuk proses bisnis antara masyarakat dengan pemerintah dan instansi lainnya.

E-Government bertujuan untuk memberikan pelayanan tanpa adanya sistim entrain yang panjang hanya untuk mendapatkan suatu pelayanan yang sederhana.

E-Government juga digunakan untuk memperluas partisipasi public dimana masyarakat dimungkinkan untuk terlibat dalam suatu pengambilan keputusan atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Bukan hanya di pemerintahan saja, melainkan e-government juga dapat dimanfaatkan dalam organisasi-organisasi swasta dan telah dapat dirasakan manfaatnya secara luas.

Adapun konsep e-government yaitu:

1. Government to Customer/Citizen (G2C)
2. Government to Business (G2B)
3. Government to Government (G2G)

Menurut Dawes (2002), e-government adalah penggunaan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan-kegiatan operasional pemerintah dengan memberikan manfaat bagi masyarakat dan menyediakan jasa atau pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat.

Sedangkan menurut Turban et al (2002), e-government didefinisikan sebagai bentuk penggunaan teknologi dan informasi secara umum dan e-commerce secara khusus untuk menyediakan kepada masyarakat (Citizens) dan organisasi-organisasi akses yang menyenangkan terhadap jasa dan informasi pemerintah, menyediakan pengiriman jasa dan informasi kepada masyarakat, partner bisnis dan pemasoknya serta kepada mereka yang berkerja di sector bisnis.

Perkembangan Teknologi dan Informasi saat ini telah dirasakan sangat memberikan perubahan yang signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perkembangan teknologi telah membawa organisasi pemerintahan untuk melakukan transformasi besar-besaran agar selalu memberikan pelayanan terbaik

kepada masyarakat. Perubahan tersebut tidak hanya dalam praktek pelayan, tetapi juga pada struktur dan manajemen organisasi. Secara konseptual, konsep dasar dari e-government adalah bagaimana memberikan pelayanan melalui elektronik, seperti melalui internet, jaringan telepon seluler dan computer, serta multimedia. Melalui pengembangan e-government, maka sejalan dengan itu dilakukan pula penataan system manajemen informasi dan proses pelayanan public yang mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

6. Konsep Pembangunan

Pembangunan diartikan sebagai suatu proses dimana terjadinya perubahan dari berbagai tingkatan atau ukuran kesejahteraan yang alami. Dimana perubahan itu dapat diukur melalui dimensi dari definisi ekonomi, social, dan juga hukum. Perubahan-perubahan tersebut ditentukan oleh siapa yang berperan penting dalam proses perubahan itu (Salim, 2002 dalam Wrihatnolo, 2006).

Pembangunan sejatinya harus ditingkatkan dalam suatu bentuk penyelenggaraan pemerintahan. Karena sebagaimana apa yang menjadi fungsi dari pemerintahan itu sendiri. Fungsi pembangunan diharapkan dijalankan dengan seefektif dan seefisien mungkin. Selain itu pembangunan yang dilakukan hendaknya haruslah merata secara nasional. Tidak adanya tebang pilih berdasarkan factor kepentingan-kepentingan tertentu.

Pembangunan merupakan upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana dalam melaksanakan perubahan yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi serta perbaikan mutu kesejahteraan dari seluruh elemen masyarakat yang dilakukan

oleh pemerintah melalui dukungan serta partisipasi dari tiap-tiap masyarakatnya (Mardikanto, 1993).

Berdasarkan pelaksanaan UU tentang Desa, mengatur tentang mekanisme tata kelola penyelenggaraan Pemerintah Desa termasuk didalamnya Pembangunan Desa. Menurut Riyadi (2005:5) “Pembangunan adalah suatu proses yang dilakukan secara sadar dan terencana. Dan perkembangan adalah dampak yang dihasilkan dari proses tersebut”.

Sedangkan menurut Soekanto (2006:356) “Proses yang terjadi secara sengaja berdasarkan suatu rencana tertentu yang menyebabkan terjadinya perubahan di segala bidang kehidupan disebut dengan Pembangunan”.

Pembangunan yang baik, akan terselenggara apabila diawali dengan perencanaan yang baik pula. Sehingga hal tersebut dapat dilakukan dan dilaksanakan oleh pelaku pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

7. Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat, hakekat dan martabat serta rasa percaya diri yang mampu meningkatkan harga dirinya, sehingga mampu menjaga tatanan nilai budaya setempat (Sedarmayanti,;116).

Widjaja (2003;169), mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan pemberdayaan ialah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga masyarakat tersebut mampu mengembangkan diri secara baik dibidang ekonomi, social agama dan budanya.

Wasistiono (2003;60), pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan cara-cara berikut:

1. Memberikan kebebasan yang baik dalam mengambil keputusan berupa tindakan-tindakan tertentu.
2. Memberikan kesempatan yang lebih, terhadap seseorang yang melakukan sesuatu.
3. Memberikan akses yang luas, baik berupa akses kepada pengambilan keputusan, akses dukungan pembiayaan maupun akses-akses lainnya yang diperlukan untuk membangun kemandirian.
4. Membangun kemandirian karakter yang mengarah pada kemandirian.

Soekanto (dalam Rauf, 2005;18) mengungkapkan bahwa pemberdayaan merupakan upaya yang penting untuk dilakukan karena kegiatan tersebut mengatur perilaku seseorang dalam batas-batas tertentu. Pemberdayaan mencakup tiga hal yaitu:

1. Pemberdayaan yang meliputi norma-norma yang dibutuhkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Pemberdayaan yang diartikan ini sebagai rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Pemberdayaan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Pemberdayaan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur-struktur social di masyarakat.

Giroth (dalam Rauf, 2005;16) memberikan penjelasan mengenai pemberdayaan yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memandang konsep sebagai pikiran tentang yang diharapkan dari seseorang dalam keadaan tertentu yang dikaitkan dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh masing-masing individu itu dari pada dengan posisinya. Ada 2 hal yang jelas termasuk dalam pemberdayaan dan bukan posisinya yaitu:

1. Tanggung jawab (*responsibility*).
2. Otoritas (*authority*).

B. Penelitian Terdahulu

Sebelum penulis membuat penelitian mengenai Evaluasi Program Desa Broadband Terpadu, ada beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian berkenaan dengan judul serupa. Namun dari setiap penelitian yang telah dilakukan, melahirkan berbagai perbedaan hasil. Dari beberapa penelitian tersebut, penulis menjadikannya sebagai bahan tambahan dan referensi penulis. Namun demikian, penulis tetap membedakannya dengan penelitian-penelitian terdahulu sebagaimana dapat dijabarkan:

Tabel II.1 : Tabel Judul Penelitian Terdahulu Yang Berkaitan Dengan Program Desa Broadband Terpadu.

Judul Jurnal	Kajian Penelitian	Aspek Yang Membedakan
1	2	3
Pemanfaatan Program Desa Broadband Terpadu Oleh Masyarakat Desa Luhutharato. Vol. 19 No. 2 Desember 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan pada bagaimana partisipasi dari masyarakat Desa Luhutharato NTT dalam memanfaatkan program DBT. • Pendekatannya 	<ul style="list-style-type: none"> • Peneliti lebih memfokuskan pada pelaksanaan program dan bagaimana hasil pelaksanaan program tersebut

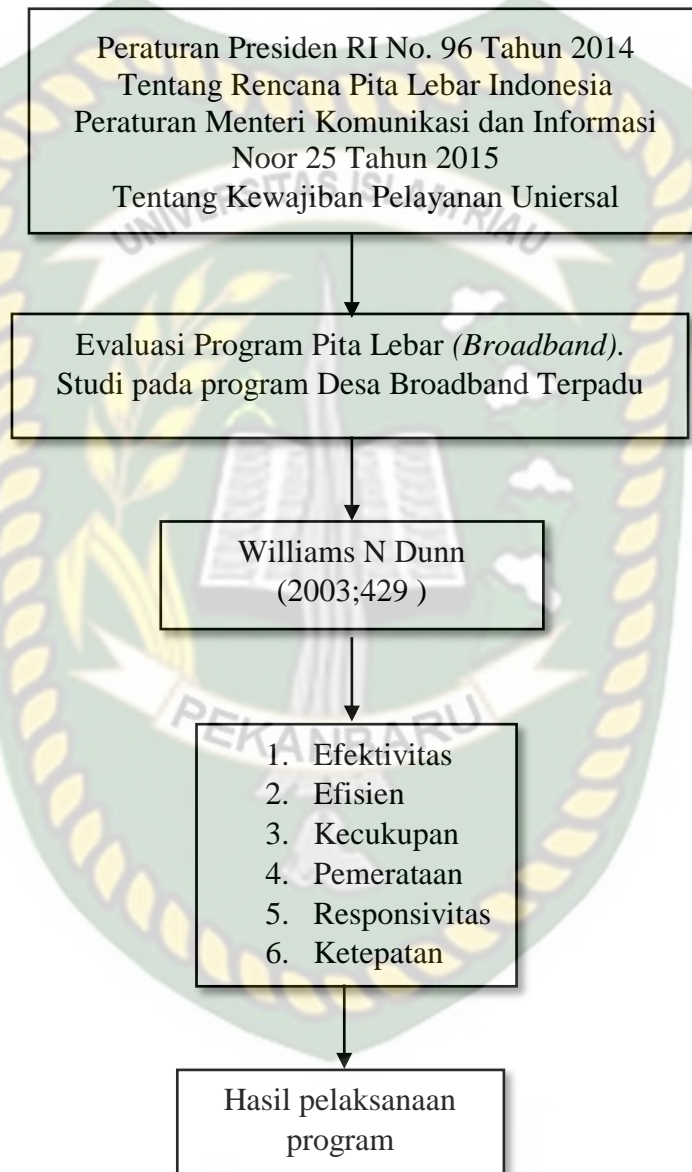
Judul Jurnal	Kajian Penelitian	Aspek Yang Membedakan
1	2	3
	<p>menggunakan pendekatan Kualitatif Deskriptif, dengan analisis data interaktif.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hasil yang diperoleh yaitu fasilitas program lebih banyak digunakan oleh pendatang dari pada penduduk setempat. 	
<p>“Implementasi Desa Broadband Terpadu”. Vol. 18 No. 1 Juni 2017</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi program DBT pada desa penerima program dan kendala-kendala yang dihadapi. • Pendekatan yang digunakan adalah Kualitatif • Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi dari program tersebut masih belum berjalan dengan maksimal. Karena koneksi internet yang masih lambat, lokasi DBT yang dinilai tidak strategis, terbatasnya layanan service, serta belum adanya juklak dan juknis yang jelas mengenai program DBT tersebut. • Penelitian dilakukan di 6 desa yaitu <ol style="list-style-type: none"> 1. Riau (Desa Kadur, Desa Bokor, Desa Tanah Merah, Desa Wonosari) 2. Kepulauan Riau (Kelurahan Tanjung Sari dan Desa Kampung Hilir) 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan program DBT yang diterapkan. • Penelitian dilakukan hanya focus pada satu desa yaitu Desa Bokor Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.
<p>“Pengembangan Desa Broadband Terpadu”. Vol.14 No. 3,</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian dilakukan untuk lebih mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan Program DBT. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian dilakukan focus pada satu desa yaitu Desa Bokor.

Judul Jurnal	Kajian Penelitian	Aspek Yang Membedakan
1	2	3
September-Desember 2016: 175-184.	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian dilakukan di 3 desa pertanian yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. 	
“Analisis Efektivitas Perangkat pada Program Desa Broadband Terpadu”. Vol. 14. No.2 (2016):95-112	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini lebih memfokuskan pada efektivitas perangkat yang digunakan dalam pelaksanaan program DBT dan keterkaitannya dengan konektivitas. • Metode yang digunakan adalah Kuantitatif. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini dilakukan dengan focus pada pelaksanaan program. • Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode Kualitatif.
“Tata Kelola Desa Broadband di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau”. Vol.5 No. 2, Desember 2016: 109-118.	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian lebih memfokuskan bagaimana Tata Kelola Desa Broadband Terpadu di Desa Wonosari, Bengkalis. • Penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam program DBT. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian lebih kepada bagaimana hasil pelaksanaan program DBT dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

(Sumber : Olahan Penulis 2019)

C. Kerangka Pikir

Gambar II.1 : Evaluasi Program Desa Broadband Terpadu (DBT) Di Desa Bokor Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti



Sumber : Modifikasi Penulis 2019

D. Konsep Operasional

Adapun yang menjadi konsep operasional dalam penelitian mengenai Evaluasi Program Desa Broadband Terpadu (DBT) di Desa Bokor Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat, sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan manusia dan masyarakat.
2. Desa adalah suatu Komunitas masyarakat dalam skala kecil yang berdomisili di suatu wilayah tertentu dan bermata pencaharian sebagian besar adalah sebagai nelayan atau petani, yang memiliki hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.
3. Pemerintahan Desa adalah suatu penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal usul serta adat istiadat yang diakui dan dihormati oleh masyarakat setempat.
4. *E-Government* merupakan suatu pemanfaatan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam melaksanakan kegiatan pemerintah agar lebih ternilai efisien dan murah
5. Evaluasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan sengaja dalam membandingkan antara standar yang ada dengan fakta pelaksanaan yang dilakukan.

6. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah. Dengan demikian kebijakan sebuah tindakan pemerintah dalam bentuk program-program dalam mencapai tujuan dan sasaran pemerintah.
7. Program adalah kebijakan atau dalam hal ini termasuk dalam bentuk kebijakan publik yang secara prinsip dapat diartikan sebagai “*Whatever government choose to do or not to do*”. Dimana didalamnya terdapat suatu target atau pencapaian yang harus terpenuhi.
8. Program Desa Broadband Terpadu atau yang disingkat dengan DBT merupakan salah satu program prioritas untuk desa, dengan menyediakan layanan akses internet, perangkat pengguna, serta aplikasi yang akan disesuaikan dengan karakteristik penduduk desa untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh desa terpilih. Dengan dilengkapi pendanaan dari USO. Sehingga pihak yang menjalankan program tersebut sejatinya menjalankan asas Tugas Pembantuan.
9. Pemberdayaan Masyarakat, adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat. Baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan.
10. Pembangunan adalah segala bentuk upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas seluruh aspek kehidupan masyarakat sekaligus proses pengembangan system penyelenggaraan pemerintahan kearah yang lebih baik dari pada sebelumnya.

11. Evaluasi merupakan bentuk aktivitas atau kegiatan yang dilakukan guna melihat tingkat kinerja suatu kebijakan, sejauh mana kebijakan tersebut mencapai sasaran dan tujuannya.
12. Efektivitas yaitu apakah hasil yang diinginkan telah tercapai, dimana tujuan dari program DBT itu tercapai.
13. Kecukupan yaitu seberapa jauh hasil yang telah dicapai mampu menyelesaikan masalah yang ada, dimana dengan adanya program DBT akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa.
14. Pemerataan yaitu apakah perangkat pendukung program dapat dimanfaatkan secara merata oleh setiap sasaran program DBT.
15. Responsivitas, yaitu apakah hasil kebijakan tersebut meningkatkan partisipasi dari setiap sasaran Program DBT.
16. Ketepatan, apakah yang dibuat ini sesuai dengan visi dan misi dalam memecahkan permasalahan kesenjangan Teknologi Informasi yang ada.

E. Operasional Variable

Tabel II.2 Konsep Evaluasi Program Desa Broadband Terpadu (DBT) Di Desa Bokor Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Evaluasi dilakukan untuk melihat tingkat kinerja suatu kebijakan, sejauh mana kebijakan tersebut mencapai sasaran dan tujuannya. (William N, (2003;429)	Evaluasi Program Desa Brodband Terpadu	1. Efektivitas 2. Efisiensi 3. Kecukupan 4. Pemerataan 5. Responsivitas 6. Ketepatan	Tercapainya tujuan kebijakan program DBT. Kinerja pemerintah desa dalam pelaksanaan Program DBT Tindakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan Program Penggunaan sarana dan prasarana program digunakan secara maksimal dan dapat dirasakan secara merata pada masyarakat Respon masyarakat desa terhadap jalannya program dengan adanya perubahan gaya hidup masyarakat Kemampuan desa dan masyarakat desa dalam menjalankan program

Sumber : Modifikasi Penulis 2019

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Yaitu memberikan gambaran secara jelas dan terperinci berdasarkan fenomena social tertentu. Pengumpulan data dilakukan dengan Teknik Kelompok Diskusi Terfokus (*focus group discussion*) yang membahas hal-hal berkaitan dengan penyelenggaraan program DBT Bersama kelompok pemanfaat program dan kelompok pengelola program.

Penulis juga melakukan wawancara mendalam dengan sejumlah pihak terkait dalam penelitian ini. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moeleong (2000:3) prosedur meneliti yang menghasilkan data deskriptif yang dikemas dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dengan demikian, penulis akan memberikan pemaparan penelitian ini yakni data-data yang berbentuk tulisan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Bokor, Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti yang terletak di Provinsi Riau. Penulis memilih lokasi penelitian di Desa tersebut karena di Provinsi Riau hanya ada 2 Kabupaten yang mendapatkan program DBT ini yaitu Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Di Kabupaten Kepulauan Meranti, ada 2 desa yang menjadi desa Broadband yaitu Desa Tanah Merah dan Desa Bokor. Berdasarkan letak

desa, karakteristik masyarakat desa yang bersesuaian dengan sasaran program, maka penulis tertarik untuk melihat dan mengevaluasi pelaksanaan program Desa Broadband Terpadu di desa tersebut. Dilatar belakangi dari keterbatasan sarana listrik yang hanya dapat dinikmati oleh masyarakat di malam hari saja, namun penerapannya bisa berjalan sampai saat ini. Kemudian dari segi potensi, Desa ini cukup kaya akan sumber daya alam nya yang mampu menjadi daya tarik tersendiri bagi desa tersebut terutama dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

C. Informan dan Key Informan

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi penulis adalah informan-informan yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Informan dalam penelitian ini adalah pelaku atau orang yang benar-benar tahu dan menguasai masalah serta informasi objek yang ingin diteliti. Teknik penunjukan informan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *purposive* sampling, dengan pertimbangan bahwa informan yang ditunjuk mengetahui serta memahami masalah. Maka, dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah :

- Kepala Desa, H. Aminnullah, S.Ag.,M.Si
- 1 orang Pandu Desa, Yustami
- Ketua staff IT program DBT, Abdillah Hatta, S.Pd
- Ketua Sanggar Bathin Galang, Sopandi
- Masyarakat Desa Bokor: (Hamdani, Emalia, Abu Hasan)

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh langsung dari seluruh responden melalui wawancara yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang diperoleh dari lembaga, instansi dan dinas yang ada kaitannya dalam penelitian ini yang berupa laporan tertulis seperti data-data yang diberikan oleh Kepala Desa Bokor

E. Teknis Pengumpulan Data

Adapun teknis pengumpulan data yang penulis gunakan untuk mendapatkan informasi yang akurat, maka penelitian menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Teknik Observasi yaitu aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.
- b. Tekni Interview (Wawancara) yaitu melakukan tanya jawab dengan memberikan pertanyaan kepada objek wawancara berkenaan dengan

permasalahan yang ada. Teknik ini mampu memberikan informasi yang berkompeten karena langsung dari sumber terpercaya.

- c. Teknik Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan dokumen-dokumen, baik berupa gambar maupun dalam bentuk lainnya.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Yaitu melakukan wawancara dengan berbagai narasumber, dan selanjutnya hasil data wawancara akan dianalisis dan dilakukan secara interaktif secara terus menerus pada setiap tahap penelitian sampai tuntas sehingga setelah itu dilakukanlah penarikan kesimpulan dan pemberian saran.

G. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.1: Jadwal waktu dan kegiatan penelitian Evaluasi Program Desa Broadband Terpadu (DBT) Di Desa Bokor Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti

N O	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke																							
		Juni-Juli				Agustus				September				Oktober				November – Desember				Desember – Februari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	■	■	■	■																				
2	Seminar UP							■																	
3	Revisi UP									■	■	■	■												
4	Revisi Kuisisioner													■	■	■	■								
5	Rekomendasi Survei																	■	■	■	■				
6	Survei Lapangan																					■	■	■	■
7	Analisis Data																								
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian																								
9	Konsultasi Revisi Skripsi																								
10	Ujian Komferehensi Skripsi																								
11	Revisi Skripsi																								
12	Pengandaan Skripsi																								

Sumber : Olahan Penulis 2019.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis Daerah Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Meranti

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan Kabupaten yang terletak di Provinsi Riau, dengan ibukota Kabupaten Selat Panjang. Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki luas daratan sebesar 3.707,84 Km². Iklim di Kabupaten Kepulauan Meranti adalah iklim Tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 25⁰ C – 32⁰ C. dan curah hujan berkisar antara 16-70 mm per tahun. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki batas-batas yaitu;

Tabel IV.1 : Data Perbatasan Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti

NO	Batas Wilayah	Daerah Yang Berbatasan
1.	Batas wilayah sebelah Utara	Selat Malaka dan Kabupaten Bengkalis
2.	Batas wilayah sebelah Selatan	Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
3.	Batas wilayah sebelah Barat	Kabupaten Bengkalis
4.	Batas wilayah sebelah Timur	Kabupaten Karimun dan Provinsi Kepulauan Riau

Sumber : Badan Pusat Statistik Kepulauan Meranti 2019

Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki 9 kecamatan. Karena letak kabupaten yang berbentuk pulau-pulau kecil yang tersebar, maka kecamatan-kecamatan tersebut terbagi atas : 3 kecamatan terletak di Tebing Tinggi, 3 kecamatan terletak di Pulau Rangsang dan 3 kecamatan terletak di Pulau Padang.

Tabel IV. 2 : Data Jumlah Kecamatan Di Kabupaten Kepulauan Meranti

NO	Nama Kecamatan	Ibukota Kecamatan
1.	Tebing Tinggi Barat	Alai
2.	Tebing Tinggi	Selat Panjang
3.	Tebing Tinggi Timur	Sungai Tohor
4.	Rangsang	Tanjung Samak
5.	Rangsang Pesisir	Sonde
6.	Rangsang Barat	Bantar
7.	Merbau	Teluk Belitung
8.	Pulau Merbau	Semukut
9.	Tasik Putri Puyu	Bandul

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Kepulauan Meranti 2019

Tabel IV.3 :Data Jumlah Desa/Kelurahan Di Kabupaten Kepulauan Meranti

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan
1	Merbau	10
2	Pulau Merbau	11
3	Rangsang	14
4	Rangsang Barat	12
5	Rangsang Pesisir	11
6	Tasik Putri Tujuh	10
7	Tebing Tinggi	9
8	Tebing Tinggi Barat	14
9	Tebing Tinggi Timur	10

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Kepulauan Meranti 2019

2. Sejarah Singkat Desa Bokor

Desa Bokor adalah desa yang terletak di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. Dengan ibukota kecamatan adalah Bantar. Kata Bokor memiliki arti suatu wadah atau tempat yang berbentuk piringan atau mangkok yang terbuat dari tembaga atau emas. Asal cerita dari masyarakat dulu, bahwa sewaktu perahu kerabat Raja Siak dan keluarganya lari dari kejaran lanun (perampok) diperairan Selat Panjang, tanpa disengaja kapal mereka memasuki

kuala sungai dan beristirahat disana dalam beberapa hari. Pada suatu hari ketika Raja Siak hendak memandikan anaknya menggunakan wadah yang disebut Bokor, Bokor tersebut jatuh kedalam sungai.dan sulit untuk dicari. Maka sejak saat itu Raja Siak memberi nama desa tersebut sesuai dengan nama wadah emas yang hilang yaitu Desa Bokor. dan sebutan itu melekat hingga saat ini.

Desa bokor dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dibantu oleh sejumlah perangkat desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Perangkat desa terdiri dari Sekretaris Desa, Kaur, BPD, RT, RW dan Staff Tata Usaha. Unsur wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Dusun.

3. Luas Wilayah dan Jarak Tempuh Desa Bokor

Desa Bokor berada di Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Propinsi Riau. Dengan luas 4314 Ha/ 43,14 Km² dengan:

Tabel IV. 4 : Data Perbatasan Wilayah Desa Bokor Dengan Desa Lain

NO	Batas Wilayah	Desa Yang Berbatasan
1.	Batas wilayah sebelah Utara	Desa Sendaur
2.	Batas wilayah sebelah Selatan	Desa Selat Air Hitam
3.	Batas wilayah sebelah Barat	Desa Telaga Baru
4.	Batas wilayah sebelah Timur	Desa Kayu Ara

Sumber : Data Desa Bokor 2019

Desa Bokor memiliki 4 Dusun yaitu, Dusun Durian, Dusun Cempedak, Dusun Manggis dan Dusun Kelapa. Desa ini berada di tepi Sungai Bokor yang mengalir dari tengah Pulau Rangsang menuju Selat Hitam. Jarak tempuh

perjalanan dari ibukota Kabupaten Meranti, Selat Panjang ke Desa Bokor ditempuh sekitar 40 menit dengan menggunakan kapal pompong (sejenis kapal nelayan bermotor). Desa Bokor memiliki sekitar 800-an rumah penduduk. Adapun jarak yang dapat ditempuh dari Desa menuju ke wilayah-wilayah administrasi yaitu:

- a. Jarak tempuh perjalanan dari Desa Bokor ke Ibu Kota Kecamatan = 16 Km.
- b. Jarak tempuh perjalanan dari Desa Bokor ke Ibu Kota Kabupaten = 20 Km.
- c. Jarak tempuh perjalanan dari Desa Bokor ke Ibu Kota Provinsi = 146 Km.

4. Kondisi Lingkungan

Berdasarkan hasil observasi, kondisi lingkungan di Desa Bokor adalah sebagai berikut:

- a. Kualitas lingkungan dan bentang alam

Kualitas lingkungan Desa Bokor sangat baik dan masih asri, walaupun di beberapa tempat masih terdapat kayu-kayu bekas penebangan sagu. Desa ini dikelilingi oleh sungai dan hutan mangrove. Minimnya keberadaan bangunan-bangunan industry membuat desa ini sangat jauh dari kebisingan.

- b. Pencemaran Udara, Air, dan Bau

Di Desa Bokor tidak ditemukan adanya pencemaran udara dan bau, karenan letak desa yang jauh dari kegiatan industry. Dan minimnya polusi

kendaraan yang ada disana, karena mayoritas penduduk disana beraktifitas dengan berjalan kaki atau menggunakan sepeda kayuh saju.

c. Geografi

Kondisi Geografi Desa Bokor sebagian besar adalah relative datar, dengan rata-rata kemiringan 2-6,1 meter, atau berkisar antara 0-2%, serta memiliki ketinggian 1-6,5 mdpl. Wilayah daratan Desa Bokor sebagian besar terdiri dari rawa gambut dan rawa lebak. Berdasarkan bentuk dan ukuran butirnya, jenis tanah di Desa Bokor adalah tanah gambut dengan kondisi tanah yang stabil. Permasalahan Geografis yang timbul adalah tanah di Desa Bokor adalah tanah gambut. Kekurangan dari tanah gambut adalah dari sifat fisik tanah gambut tersebut yang kurang baik, misalnya tanah gambut memiliki Ph yang sangat rendah sehingga sifat tanahnya sangat asam.

5. Visi dan Misi Kepala Desa Bokor Periode 2019-2025

Adapun visi dari Kepala desa dalam periode 2019-2025 adalah Terwujudnya masyarakat Desa Bokor yang aman, adil, dan merata dengan dukungan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas serta dilandasi dengan iman dan taqwa (Imtaq).

Dan Misi yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa Bokor.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur jalan, jembatan, steiger, perumahan, listrik, keagamaan, keolahragaan, Pendidikan serta kesehatan, dan air bersih.
4. Meningkatkan dibidang perkebunan, nelayan dan peternakan.
5. Meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Bokor.

6. Kependudukan Desa Bokor

Desa Bokor juga termasuk kedalam kategori Desa dengan padat penduduk. Dengan jumlah total penduduk yaitu 3.662 jiwa. Sebagian besar penduduk yang menetap di Desa adalah penduduk asli yang lahir dan besar di Desa Bokor. Sebagian kecil darinya merupakan penduduk bukan asli Desa Bokor yang menikah dengan penduduk asli desa. selain itu, ada juga penduduk desa yang merantau keluar desa dengan berbagai alasan yakni untuk mengenyam pendidikan ke kota-kota besar dengan tujuan untuk mendapatkan Pendidikan yang lebih baik. Salah satu tujuan mereka adalah Kota Pekanbaru, Batam dan Tanjung Balai Karimun. Selain itu ada juga yang bekerja diluar Desa bahkan keluar Negeri seperti ke negara jiran (Malaysia dan Singapura) dengan alasan karena minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan. Rata-rata pekerjaan hanya tersedia sebatas untuk cukup biaya hidup saja seperti memanfaatkan hasil kebun, pertanian ataupun hasil laut. Sementara semakin lama kebutuhan hidup masyarakat akan semakin bertambah, sehingga tuntutan untuk memenuhi kebutuhan lainnya harus didapat dengan bekerja keluar negeri dan mereka pulang ke desa ketika mendapatkan jatah libur saja. Berikut data penjabaran kependudukan Desa Bokor :

Tabel IV. 5 : Data Kependudukan Desa Bokor Berdasarkan Usia

NO.	Kategori Usia	Persentase
1.	Berusia dibawah 15 Tahun	26 %
2.	Berusia antara 15-65 Tahun	69 %
3.	Berusia diatas 65 Tahun	5 %

Sumber : Data Desa Bokor 2019.

Tabel IV. 6 : Data Kependudukan Desa Bokor Berdasarkan Gender

NO.	Kategori Gender	Persentase
1.	Penduduk laki-laki	52 %
2.	Penduduk perempuan	48 %

Sumber : Data Desa Bokor 2019.

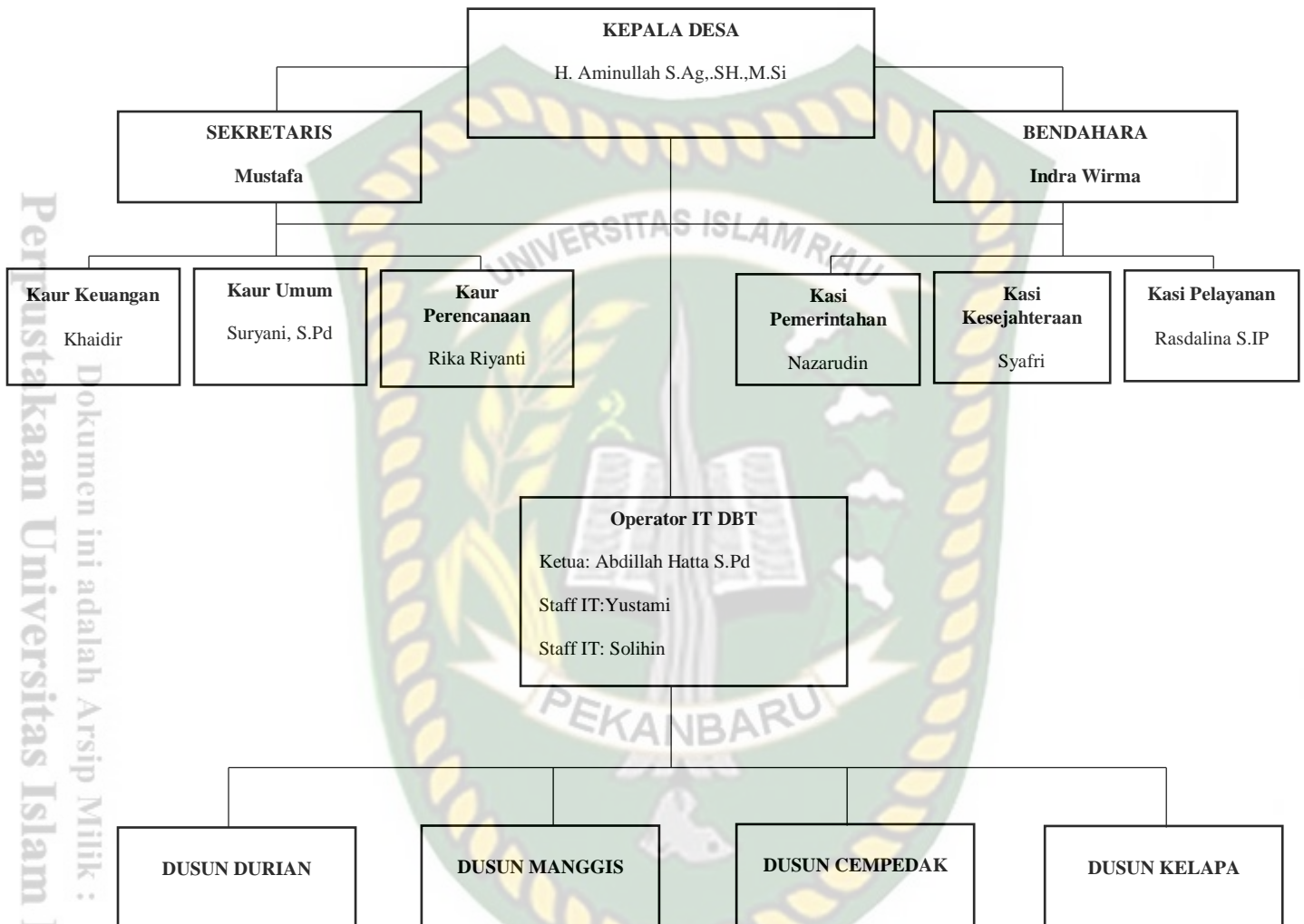
Tabel IV. 7 : Data Kependudukan Desa Bokor Berdasarkan Pekerjaan

NO.	Kategori Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1.	Belum/tidak berkerja	89	85
2.	Wiraswasta	192	45
3.	Mengurus rumah tangga	1	191
4.	Pelajar/mahasiswa	68	62
5.	Lain-lain	1610	1319

Sumber : Data Desa Bokor 2019.

B. Struktur Organisasi Kantor Desa Bokor

Gambar IV. 1 : Struktur Organisasi Perangkat Desa Bokor



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Responden dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Bokor Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti, Tim Pelaksana IT yang dibentuk oleh Kepala Desa Bokor, Tokoh Kesenian di Desa Bokor (Ketua Sanggar Bathin Galang), dan Masyarakat.

1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk melengkapi data dalam penelitian ini, maka penulis mencantumkan identitas responden berdasarkan jenis kelamin, berikut penjabaran dalam bentuk table:

Tabel V.1 : Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

NO.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	6	86 %
2.	Perempuan	1	14 %
Jumlah		7	100 %

Sumber : Hasil Penelitian di Lapangan 2019.

2. Identitas Responden Berdasarkan Usia

Dari hasil wawancara dilapangan, maka diperoleh identitas responden penelitian berdasarkan usia yaitu:

Tabel V.2 : Identitas Responden Berdasarkan Usia

NO.	Usia	Jumlah	Persentase
1.	28-35	2	28,5 %

2.	36-45	3	43 %
3.	46-65	2	28,5 %
Jumlah		7	100 %

Sumber : Hasil Penelitian di Lapangan 2019.

3. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dari hasil wawancara dilapangan, peneliti juga memperoleh identitas responden penelitian berdasarkan Tingkat Pendidikan.

Tabel V.3 : Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	Diploma 3	2	28,5 %
2.	Strata 1	4	57 %
3.	Strata 2	1	14,5 %
Jumlah		7	100 %

Sumber : Hasil Penelitian di Lapangan 2019.

B. Evaluasi Program Desa Broadband Terpadu di Desa Bokor Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti

Program Desa Broadband Terpadu yang dilaksanakan di Desa Bokor Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti, merupakan program prioritas dari Kementerian Komunikasi dan Informatika yang memang sengaja dirancang sedemikian rupa dengan karakteristik desa Berdasarkan Rencana Strategis Nasional.

Program Desa Broadband Terpadu (DBT) merupakan program yang ditujukan untuk Desa beserta masyarakat desanya demi mempercepat pembangunan yang

ada di desa dan juga memenuhi kebutuhan akan informasi. Kesesuaian lokasi juga ditentukan berdasarkan Program DBT yaitu khusus untuk desa tertinggal, terluar, perintisan, perbatasan, tidak layak secara ekonomis dan daerah lainnya yang masih membutuhkan sarana dan prasarana IT.

Program DBT ini menyediakan layanan internet untuk desa, perangkat pengguna beserta aplikasi yang akan disesuaikan dengan karakteristik penduduk desa untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh desa terpilih. Pendanaan berasal dari kontribusi dana *universal service obligation (USO)* yang merupakan bagian dari kewajiban pemerintihan dalam memenuhi pelayanan universal di bidang Telekomunikasi dan Informatika.

Untuk mengurangi kesenjangan digital antara desa dengan kota tentunya program DBT sangat bermanfaat bagi desa-desa yang telah melaksanakan program ini. Seperti halnya dengan Desa Bokor. Dalam pelaksanaan program DBT, tentu saja harus mendapatkan perbekalan yang lengkap mengenai bagaimana system pelaksanaannya sehingga dalam melaksanakannya dapat berjalan dengan baik.

Balai Penyedia dan Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Pemerintah Desa Bokor untuk melaksanakan Program DBT tersebut. BP3TI akan melakukan pengawasan kepada Desa yang telah melaksanakan Program DBT. Sementara Pemerintah Daerah Kabupaten akan menerima laporan pelaksanaan program secara rutin dari Pemerintahan Desa guna mengetahui perkembangan yang didapat dari terlaksananya program DBT tersebut di desa Bokor.

Untuk mengetahui dan menilai apakah program DBT yang ada di desa Bokor tersebut telah terlaksana dengan baik, maka perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaannya tersebut. Dengan menggunakan indikator-indikator yang dapat menunjukkan penilaian terhadap pelaksanaan program apakah terlaksana dengan baik, kurang baik atau bahkan sama sekali tidak terlaksana dengan baik.

a. Efektivitas Program Desa Broadband Terpadu (DBT) Di Desa Bokor Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.

Efektivitas merupakan suatu indikator penilaian apakah hasil yang ingin dicapai dalam suatu kebijakan/program telah tercapai atau apakah tujuan dari adanya kebijakan/program tersebut telah terpenuhi.

Dapat dilihat dari hasil wawancara penulis dengan beberapa informan terkait pengetahuan tentang Program DBT dan apa tujuan dari program tersebut.

Menurut H. Aminnullah, S.Ag. M.Si selaku Kepala Desa mengatakan “Program Desa Broadband Terpadu adalah Program yang diberikan oleh Kominfo kepada desa untuk mengembangkan potensi yang ada di desa, pembangunan baik pembangunan masyarakat maupun pembangunan infrastruktur. Dan beliau juga mengatakan bahwa tujuan dari program DBT ini adalah untuk platform pemerintah desa, mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat yaitu dengan cara masyarakat memanfaatkan fasilitas internet desa yang telah terpasang untuk menjual hasil-hasil kebun, pertanian, tangkapan ikan, maupun kerajinan tangan ke luar desa, Pendidikan, dan lain sebagainya”. (21 Oktober 2019)

Penjelasan yang tidak terlalu berbeda dengan wawancara penulis kepada informan berikut:

Menurut Yustami selaku Pandu Desa, mengatakan “Program DBT adalah internet untuk desa dimana semua fasilitas keperluan program disediakan oleh Kominfo melalui BP3TI” dan tujuan dari program ini adalah “untuk membantu pemerintah desa dalam mengubah system pelayanan agar lebih mudah dan juga untuk membantu masyarakat mengenal dunia luar melalui internet sehingga lebih meningkatkan perubahan masyarakat desa”. (21 Oktober 2019)

Menurut Ketua Staff IT Abdillah, yang dibentuk oleh kepala desa Bokor, “Program internet desa DBT ini baik, sangat bermanfaat terhadap perkembangan desa. Karena program ini langsung diawasi oleh BP3TI, dan segala fasilitas pendukungnya juga dibiayai penuh. Jadi desa hanya tinggal menjalankannya saja”. (21 Oktober 2019)

Lalu dirasa belum cukup untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang penulis inginkan, maka penulis membutuhkan pemahaman terkait tujuan program DBT dari pihak masyarakat yaitu:

Emalia yang berprofesi sebagai guru SD di Desa Bokor “Ia tahu bahwa saat ini Desa Bokor dilengkapi jaringan internet. Dan masyarakat sudah tidak kesulitan lagi untuk berkomunikasi, browsing, termasuk jaringan telephone juga sudah lancar tidak seperti dulu”. (21 Oktober 2019)

Menurut Hamdani salah satu masyarakat Desa Bokor mengatakan “beliau tahu Program DBT sebagai program untuk internet desa. Tujuannya adalah agar masyarakat bisa mencari informasi dari Hp dengan membuka internet, tetapi untuk mengurus surat menyurat masih manual, belum melalui internet”. (22 Oktober 2019)

Menurut Sopandi selaku ketua sanggar Bathin Galang, “ DBT adalah program internet desa, yang bertujuan agar desa lebih berkembang, bisa mempromosikan budaya local keluar, dan bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat desa ini sendiri”. (22 Oktober 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan masyarakat Desa Bokor sudah mengetahui program DBT yang telah dilaksanakan di desa mereka. Namun hanya sebagian yang mengetahui program DBT yang sebenarnya itu seperti apa, juga tujuan dasar dari program tersebut. Sebagian lain hanya mengetahui secara umum bahwa Desa Bokor saat ini sudah dilengkapi dengan akses internet. Dan ini memudahkan masyarakat untuk mencari informasi dari luar.

Lalu wawancara penulis berlanjut menyinggung persoalan sosialisasi Program DBT. Karena ketika suatu kebijakan atau program ingin dijalankan idealnya harus melalui tahapan sosialisasi terlebih dahulu.

Kepala Desa Bokor H. Aminullah mengatakan “ Sosialisasi pernah dilakukan oleh BP3TI di Kecamatan. Seluruh kepala desa se-kecamatan Rangsang Barat diundang hadir. Dan saat sosialisasi, BP3TI mengenalkan DBT itu apa, dan bagaimana proses agar Pogram DBT itu bisa dilaksanakan di masing-masing desa. Walaupun tidak semua desa di Meranti yang mendapatkan program tersebut. Sementara sosialisasi kepada masyarakat belum ada dilakukan, baik sebelum program dilaksanakan maupun setelah program berjalan. Tetapi dari pihak desa, sudah memberikan informasi kepada masyarakat desa Bokor bahwa desa sudah dilengkapi jaringan dan situs resmi Desa Bokor apa, agar masyarakat bisa mengakses informasi-informasi desa dari situ”. (21 Oktober 2019)

Hal serupa juga dikemukakan oleh Pandu Desa dan Ketua Staff IT Desa bahwa sosialisasi program DBT telah dilakukan.

Pandu Desa Yustami mengatakan “sosialisasi program DBT memang ada. Tetapi sosialisasi hanya dilakukan oleh BP3TI di Kantor Kecamatan, kepada Kepala Desa dan perangkat desa saja. Sementara kalau sosialisasi langsung kepada masyarakat sejauh ini belum ada dilakukan”. (21 Oktober 2019)

Abdillah Ketua Staff IT mengatakan “Sosialisasi tentang program DBT pernah dilakukan, yang melakukan adalah BP3TI di Kecamatan sebelum program itu dijalankan yaitu tahun 2015, untuk tanggal beliau tidak memberikan informasi yang rinci kepada penulis. Yang jelas sosialisasi dilakukan tidak kepada masyarakat, melainkan hanya kepada perangkat Desa saja, dan setelah sosialisasi itu, ada pembekalan berupa diklat yang dilaksanakan di Jakarta. Dan yang diutus untuk mengikuti diklat tersebut adalah ketua tim IT DBT Desa Bokor”. (21 Oktober 2019)

Terkait sosialisasi program, ada pernyataan yang sedikit membenarkan bahwa sosialisasi yang dilakukan tidak kepada masyarakat, dilihat dari wawancara terhadap masyarakat.

Menurut salah satu Tokoh Masyarakat Abu Hasan “Masyarakat belum ada mendapatkan sosialisasi tentang program DBT , tetapi dari perangkat desa ada memberikan informasi bahwa desa Bokor sudah dilengkapi jaringan internet, dan saat alat-alat internetnya datang ke desa, sejumlah masyarakat juga diundang ke kantor desa untuk menyaksikan serah terimanya”.(21 Oktober 2019)

Berdasarkan hasil Observasi dan wawancara penulis, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi tentang program DBT ini sudah pernah dilakukan tetapi bukan kepada masyarakat, melainkan hanya kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa

saja. Masyarakat hanya mendapatkan informasi secara sekilas bahwa saat ini desa Bokor sudah dilengkapi jaringan internet melalui pemberitahuan dari Kepala Desa. Dan hasil observasi penulis ini dibuktikan dengan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program yang sedang berjalan.

Menyambung wawancara diatas, penulis kembali menanyakan terkait kegiatan pendukung dalam jalannya Program Desa Broadband Terpadu di Desa Bokor kepada sejumlah informan yang sama.

Yustami mengatakan “kegiatan pendukung Program DBT seperti mengikuti diklat yang diadakan oleh BP3TI di Jakarta, saat itu yang diutus adalah Ketua Tim IT DBT, sejauh ini untuk kegiatan pendukung dari program itu belum terlalu jelas, tetapi setiap informasi tentang desa selalu diupload di web desa”. (21 Oktober 2019)

Sementara menurut Abdillah Ketua Tim IT desa, kegiatan pendukung yang ada belum dapat dikatakan cukup. Dilihat dari wawancara berikut:

“karena program ini juga baru diimplementasikan, pelaksanaannya juga masih berangsur. Kegiatan pendukung memang belum begitu terlihat. Tetapi ada kegiatan-kegiatan luar yang memang dijadwalkan pertahunnya oleh BP3TI berkenaan dengan program DBT seperti diklat. Di diklat semua pelaksana DBT dari desa diberikan bekal untuk pelaksanaan DBT”. (21 Oktober 2019)

Sementara menurut masyarakat, kegiatan pendukung program memang tidak mereka ketahui, hal ini terbukti dalam hasil wawancara yaitu:

Menurut Hamdani ‘ Kegiatan pendukung program masyarakat tidak begitu tahu seperti apa, tetapi ada kemajuan desa yang bisa diamati. Misalnya setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan di desa, selalu di masukkan kedalam web desa, masyarakat bisa mendapatkan pola hidup yang lebih maju dari yang tidak kenal internet sampai yang kenal dengan internet, dan dari situ juga nama Desa Bokor lebih di kenal dengan cepat”. (22 Oktober 2019)

Emalia berpendapat bahwa “ beliau hanya tau internet untuk desa, dan kegunaannya sejauh ini sebatas mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi. Kalau kegiatan pendukung program ini apa ia juga tidak tahu dengan jelas. Tetapi sayangnya untuk mengurus surat-surat atau layanan lainnya masih manual. Tidak seperti di Kota yang semua serba online. Jadi masyarakat masih harus pergi ke kantor desa”. (21 Oktober 2019)

Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa informan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa, kegiatan pendukung program Desa Broadband Terpadu ini belum begitu jelas seperti apa, hanya saja ada pembekalan dari pengusung program yaitu BP3TI kepada pelaksana program DBT yaitu melalui diklat.

Berdasarkan seluruh hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan DBT di Desa Bokor kurang efektif.. Secara keseluruhan masyarakat Desa Bokor sudah mengetahui program DBT yang telah dilaksanakan di desa mereka. Namun ada sebagian lain hanya mengetahui secara umum bahwa Desa Bokor saat ini sudah dilengkapi dengan akses internet.

Tujuan dari program DBT ini belum sepenuhnya tercapai. Karena pola layanan umum desa juga belum berubah berbasis system. Sementara tujuan lain seperti membuat masyarakat desa menjadi melek akan internet sudah terpenuhi. Dengan adanya internet desa memudahkan masyarakat untuk mencari informasi dari luar.

Selain itu sosialisasi tentang program DBT ini memang pernah dilakukan tetapi bukan kepada masyarakat, melainkan hanya kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa saja. Masyarakat hanya mendapatkan informasi secara sekilas bahwa saat ini desa Bokor sudah dilengkapi jaringan internet melalui pemberitahuan dari Kepala Desa. Kegiatan pendukung program Desa Broadband Terpadu ini belum begitu jelas seperti apa, hanya saja ada pembekalan dari pengusung program yaitu BP3TI kepada pelaksana program DBT melalui diklat yang dilakukan seminggu di Jakarta.

Dan berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan, penulis juga tidak menemukan adanya bentuk kegiatan pendukung program DBT ini. Penulis hanya melihat bahwa keberadaan program ini dapat masyarakat terima meskipun tidak ada bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BP3TI maupun Kominfo langsung.

b. Efisiensi Program Desa Broadband Terpadu di Desa Bokor Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti

Efisiensi merupakan usaha-usaha yang dapat dilakukan atau seberapa banyak usaha yang diperlukan agar tujuan dari suatu kebijakan atau program dapat tercapai.

Dalam pelaksanaan Program tentu harus memahami dulu bentuk pelaksanaan program tersebut seperti apa, sehingga penulis perlu menanyakan terkait bentuk pelaksanaan program DBT itu sendiri.

Menurut Kepala Desa H. Aminullah, bentuk pelaksanaan Program dapat dilihat dengan hasil wawancara berikut:

“Kepala Desa bersama pandu desa membentuk dulu Tim IT desa yang di SK kan, dan yang mengoperasionalkan alat, system, dan lain sebagainya adalah Tim IT tersebut. Termasuk melayani masyarakat yang bertanya seputar website desa, mengurus pelayanan melalui internet, atau kendala terkait sinyal, bagaimana cara menjual produk melalui internet dan lainnya. Jadi alat berupa wifi akan dihidupkan setiap hari. Karena di desa Bokor terkendala listrik, sehingga untuk menghidupkan wifi tidak bisa full 24 jam. Nantinya tim IT akan memuat berita desa ke laman website desa, sehingga seluruh perkembangan, aktifitas, berita-berita seputar desa akan dimuat di website desa yang sudah terdaftar langsung ke Kominfo Pusat”. (21 Oktober 2019)

Lalu penulis memberikan pertanyaan yang sama kepada Ketua Tim IT DBT terkait dengan bentuk pelaksanaan dari Program itu sendiri.

“Pelaksanaannya memang dari Tim IT, tugasnya adalah mengupdate setiap informasi baru terkait perkembangan desa dari semua aspek (Pendidikan, kesehatan, ekonomi dll). Sebelum itu sebenarnya program DBT menyediakan aplikasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat desa untuk menunjang kebutuhan hidup mereka. Dan dari aplikasi itulah masyarakat bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi mereka. Aplikasi yang disediakan berupa aplikasi kesehata, pertanian, nelayan, perkebunan, logistic dll. Tetapi aplikasi tersebut belum diterapkan disemua desa Boradband di Indonesia, hanya beberapa desa yang baru menerapkannya. Website desa yang sudah didaftarkan pada saat mendaftarkan usulan program, langsung dipantau dari pusat. Tujuan utama adalah mengubah pola pelayanan manual ke pola pelayanan berbasis internet, dan halnya memang belum terwujud maksimal, karena masih terkendala pengetahuan masyarakat. Selain dari kegiatan tersebut, Tim IT juga akan memberikan edukasi kepada pengguna smartphone bagaimana mengoperasionalkannya. Karena petunjuk teknis memang tidak ada dari kominfo ataupun BP3TI, jadi Tim IT melaksanakan program ini berdasarkan petunjuk hasil diklat kemarin. Setiap bulan nya Tim IT akan mengirimkan laporan mengenai program DBT ke Kominfo di kabupaten dan secara tersystem Laporan tersebut akan masuk ke Kominfo Pusat”. (21 Oktober 2019)

Dari pandu desa jawaban yang penulis dapatkan berupa pelaksanaan-pelaksanaan teknis umumnya. Seperti yang telah dijabarkan berikut:

“ pelaksanaan program DBT ini sederhana. Karena berbasis system, jadi yang mengoperasionalkannya adalah yang memegang system itu. Sementara dari kepala desa hanya akan membimbing pelaksanaanya. Jika ada kendala-kendala, maka selaku pandu desa akan ikut turun, dan melaporkan kepada kominfo kabupaten atau BP3TI yang pernah ke desa saat serah terima perangkat DBT. Terkait alat jika ada yang rusak, maka pandu desa dan Tim IT akan segera melapor agar system di desa tidak mati. Antara pandu desa dengan tim IT akan selalu berkoordinasi”. (21 Oktober 2019)

Sementara jawaban lain penulis temukan ketika melakukan wawancara dengan masyarakat dan Ketua Sanggar Seni, dimana dapat dilihat sebagai berikut:

Hamdani sebagai masyarakat mengatakan “ kalau pelaksanaan program DBT ia tidak tahu jelas, tetapi setiap hari wifi desa akan dihidupkan. Jadi kalau ada masalah atau keperluan yang menyangkut internet, masyarakat langsung ke kantor desa untuk minta bantu. Dan kalau wifi mati, masyarakat bisa juga melapor ke kantor desa”. (22 Oktober 2019)

Sopandi Ketua Sanggar Bathin Galang juga mengatakan “ pelaksana nya ada tim sendiri di kantor desa, dan pelaksanaan program tersbut pastinya Tim IT

yang lebih paham. Sementara masyarakat tinggal menikmati saja layanan internet. Karena sekarang ini semua serba online, jadi memang sangat terbantu dengan adanya program DBT. Seperti Sanggar Kesenian, butuh akses internet yang bagus untuk mengeksplorasi kesenian. Dan terbukti juga dengan masuknya program DBT di Bokor,, banyak perkembangan sanggar yang melesat. Bahkan mereka bisa membuat festival seni kelas dunia dengan mendatangkan seniman-seniman dari Thailand, Singapore, Malaysia, Brunei, dan kemarin sempat dari Eropa”. Bagusnya semua kegiatan itu masih bisa dilihat di website desa. Jadi desa Bokor bisa dikenal dunia karena program DBT”. (22 Oktober 2019)

Dari jawaban-jawaban yang penulis dapatkan melalui wawancara langsung, maka dapat disimpulkan bahwa bentuk pelaksanaan Program Desa Broadband Terpadu yang dilaksanakan di Desa tersebut melalui beberapa tahapan, mulai dari membentuk Tim IT sampai kepada memberikan laporan Perkembangan DBT kepada Kominfo Daerah dan Kominfo Pusat. Jika dari sudut pandang masyarakat, memang tidak semua yang mengetahui bagaimana bentuk pelaksanaan program itu sendiri, karena yang mengoperasikan system memang dari Tim IT desa. Namun masyarakat ikut terlibat melalui pemanfaatan program itu kedalam keseharian mereka. Sehingga ada progress kemajuan system yang digunakan untuk menjadi laporan kepada Kominfo.

Dan berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan, penulis melihat langsung bagaimana Tim IT menjalankan system dari program DBT tersebut. Memang dapat dikatakan bahwa segi teknis adalah tanggung jawab dari Tim yang telah dibentuk. Sementara jika dilihat dari pelaksanaan program yang dilakukan masyarakat, dari hasil observasi tersebut penulis menemukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat terhadap bentuk-bentuk pelaksanaan program ini cukup baik.

Lantas jika dalam pelaksanaan program tersebut diserahkan kepada Tim IT yang telah di SK kan oleh Kepala Desa, bagaimana pula keterlibatan Kepala Desa dalam program DBT ini, hal ini menjadi lanjutan wawancara penulis selanjutnya.

Menurut Pandu Desa Yustami “Kepala Desa sangat berperan dan berpengaruh. Karena usulan program DBT juga merupakan usulan Kepala Desa, yang melobi pihak-pihak terkait hingga akhirnya Bokor dipilih sebagai desa DBT juga Kepala Desa. Sebelum Desa Bokor ditetapkan sebagai Desa Broadband Terpadu, yang mengikuti proses penetapan program dari awal sampai akhirnya ditetapkan adalah Kepala Desa. Setelah Desa Bokor terpilih sebagai pelaksana Program barulah ada kebijakan dari Kepala Desa untuk membentuk Tim IT DBT di Desa Bokor. Kepala Desa selalu memantau bagaimana progress DBT. Dan pertanggungjawaban tetap berada di Kepala Desa. (21 Oktober 2019)

Menurut Abu Hasan salah satu Tokoh Masyarakat di Desa Bokor, dan salah satu informan lainnya menyatakan :

“ Kinerja kepala desa terkait dengan pelaksanaan program DBT sangat baik. Dilihat dari cara membina perangkat-perangkat desa, kemudian membantu masyarakat jika terdapat kendala, dan yang terpenting respon terhadap perkembangan masyarakat sangat baik, beliau selalu mengarahkan anak-anak muda untuk bisa menggunakan internet agar memiliki manfaat dalam kehidupan’. (21 Oktober 2019)

Menurut Emalia sedikit berbeda, “ Menurutnya kinerja kepala desa kurang bisa dipastikan bagaimana, karena sepengetahuannya kepala desa jarang juga berada di tempat, beliau selalu keluar. Jadi apa-apa berkaitan dengan internet ataupun program itu, bukan Kepala Desanya yang akan dicari masyarakat. Tetapi yang mengurus IT desa ini”. (21 Oktober 2019)

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan, maka dapat kita lihat bahwa keterlibatan Kepala Desa dalam program DBT sangat berpengaruh. Karena yang mengikuti proses untuk menjadikan Desa Bokor sebagai Desa Broadband Terpadu adalah Kepala Desa. Hanya saja dalam mengoperasikan system bukan Kepala Desa langsung, melainkan melalui Tim IT yang memang ditugaskan untuk menjalankan program DBT.

Lalu untuk mengetahui bagaimana kinerja pandu desa dan pelaksanaan program atau Tim IT penulis kembali melakukan wawancara dengan menghasilkan jawaban-jawaban sebagai berikut:

Melalui wawancara dengan Sopandi Ketua Sanggar Seni Bathin Galang, ia menjelaskan mengenai kinerja pandu desa yang ia amati.

“Kinerja Pandu Desa dengan Tim IT DBT sangat baik menurutnya mungkin karena ada kedekatan sebagai rekan yang secara tidak langsung mempengaruhi kinerja di kantor desa. Dan tanggap pandu ataupun tim IT terkait pelaksanaan program DBT bagus dan kompak. Berdasarkan pengamatannya belum ada pelaksanaan-pelaksanaan DBT yang tidak memberikan dampak baik bagi masyarakat desa, walaupun ada dampak buruk juga terhadap anak-anak usia sekolah, tapi itu hanya bagi yang salah menggunakan kebebasan internet saja. Tetap semua harus berada dalam pengawasan orang tua”. (22 Oktober 2019)

Kemudian penulis juga melakukan wawancara kepada Kepala Desa Bokor:

Menurut H. Aminullah selaku kepala desa “ Beliau mengapresiasi kinerja pandu desa dan tim IT. Program DBT bisa dijalankan karena pandu desa dan tim IT yang juga berkompeten dalam bidang IT. Ketika ada kerusakan atau masalah dengan alat, dapat dilihat respon keduanya cepat dalam mengatasi masalah tersebut. Bahkan Kepala Desa sendiri terkadang tidak tahu jika ada alat yang bermasalah, karena sudah teratasi. Beliau hanya tahu lewat laporan yang dibaca saja”. (21 Oktober 2019)

Penulis juga mewawancarai masyarakat, untuk dapat menilai bagaimana kinerja dari pandu desa dan tim IT dari sudut pandang masyarakat pula:

Menurut Hamdani “ yang mengoperasionalkan program kan mereka, jadi pasti pandu desa dan tim IT saling berkerjasama. Kalau kami sebagai masyarakat paling taunya wifi sedang nyala atau mati saja. Menurut saya rata-rata masyarakat disini juga tidak begitu tau bagaimana pelaksanaan DBT, tetapi hanya tau jika wifi desa sedang tidak bagus atau bagus”. (22 Oktober 2019)

Secara keseluruhan mengakui bahwa keberhasilan program DBT di Desa Bokor adalah karena kinerja dari pandu desa dan tim IT yang baik dan berkompeten di bidang IT. Hal ini dapat dilihat oleh masyarakat juga Kepala Desa Bokor sendiri. Selain itu karena hubungan kedekatan sebagai kerabat kerja

mungkin menjadi salah satu factor mereka dalam menjalankan tanggung jawab. Pekerjaan yang dibebankan akan terasa ringan karena baiknya komunikasi diantara mereka.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis dapatkan, bahwa kinerja pandu desa dan Tim IT memang baik dan berkompeten. Mereka saling berkerjasama dalam menjalankan program DBT tersebut. Selain itu, penulis juga melihat bahwa system yang dijalankan oleh Tim IT juga baik, hal ini dibuktikan dengan tingkat progress situs desa yang semakin hari semakin banyak perkembangan.

Kesimpulan yang dapat penulis ambil dari berbagai hasil wawancara terhadap pelaksanaan program Desa Broadband Terpadu di Desa Bokor adalah efisiensi pelaksanaannya sudah bagus. Dikarenakan adanya keterlibatan Kepala Desa dalam program DBT itu sendiri, dan juga karena kinerja dari seluruh elemen yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program DBT tersebut baik dan berkompeten dibidang IT. Pelaksanaannya dapat dinilai efisien walaupun tidak semua masyarakat di Desa Bokor mengetahui secara detail bentuk pelaksanaan dari program DBT. Namun masyarakat tetap menikmati keberadaan Internet di desa mereka.

c. Kecukupan Program Desa Broadband Terpadu di Desa Bokor Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti

Kecukupan merupakan indicator yang dapat melihat seberapa jauh hasil yang telah dicapai dapat menyelesaikan masalah yang ada, serta adanya tindakan yang dilakukan dalam penyelesaian masalah tersebut.

Secara mendalam penulis melakukan wawancara dengan informan-informan yang ada untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaan program DBT ada banyak kendala-kendala, atau bahkan tidak ditemui kendala sama sekali.

Kepala Desa Bokor mengatakan :

“Dalam pelaksanaan program DBT di Desa Bokor pasti ada ditemukan kendala, Kebanyak kendala yang ada adalah berupa kendala teknis. Karena program ini berbasis system. Yang menjadi permasalahan utama adalah listrik di Desa. Listrik di Desa Bokor tidak menyala full 24 jam, biasa menyala dari pukul 17.00-06.00 saja. Sementara akses internet membutuhkan kapasitas listrik yang memadai. Sesekali memang ada listrik menyala full seharian, namun hanya sese kali saja”. (21 Oktober 2019)

Jawaban serupa juga penulis dapatkan dari wawancara dengan Ketua Tim IT DBT:

“Permasalahan utama adalah listrik yang tidak full menyala 24 jam. Baginya listrik sangat penting, selama beroperasi perangkat DBT semua akan menggunakan listrik. Sebagai operator IT beliau harus membagi jam-jam yang dikiranya masyarakat akan membutuhkan jaringan internet, misal pada saat jam kerja, jam sekolah atau jam-jam produktif lainnya. Jadi pada saat jam-jam tersebut seusaha mungkin seluruh perangkat akan dipastikan menyala walaupun listrik sedang tidak menyala. Kemudian permasalahan kedua yang beliau utarakan adalah tingkat kepekaan masyarakat itu sendiri. Kebanyakan hanya usia-usia tertentu yang peka terhadap keberadaan internet, bahkan ada yang sama sekali tidak merasa bahwa internet itu adalah kebutuhan bagi mereka”. (21 Oktober 2019)

Hal serupa juga dibenarkan oleh masyarakat, dapat dilihat melalui hasil wawancara dengan Ibu Emalia berikut:

“kendala yang paling bisa dirasakannya adalah listrik. Jika wifi desa tidak dinyalakan karena disebabkan listrik mati, kehidupan desa akan seperti kehidupan biasa dulu desa tanpa internet. Tetapi bagi masyarakat sebenarnya tidak terlalu menjadi masalah besar. Yang terpenting bagi mereka adalah pekerjaan mereka sehari-hari sebagai nelayan, petani karet, dan berkebun tidak mendapat permasalahan apapun. Masyarakat sudah terbiasa hidup tanpa gadget. Namun bagi sebagian masyarakat yang sudah memiliki gaya hidup yang lebih maju pasti hal tersebut akan menjadi kendala baginya. Menurutnya adanya jaringan internet adalah bonus bagi desa, yang membedakan desa Bokor dengan

desa-desa disekitar yang masih belum masuk jaringan internet”. (21 Oktober 2019)

Berdasarkan jawaban-jawaban yang penulis dapatkan, dapat kita lihat bahwa dalam pelaksanaan program DBT listrik memang sangat dibutuhkan. Desa Bokor memiliki permasalahan dibidang listrik. Karena hanya didapat masyarakat dari pukul 17.00-06.00 saja. Sementara pelaksanaan program DBT sejatinya membutuhkan listrik 24 jam. Tetapi bagi sebagian masyarakat yang masih memiliki pola hidup sebagai masyarakat desa yang tidak begitu menganggap keberadaan internet itu penting, akan merasa biasa-biasa saja jika jaringan internet mati. Bagi mereka yang terpenting adalah pekerjaan mereka di desa tidak terkendala apapun. Namun sebagian masyarakat yang pola hidupnya sudah berubah menjadi peka terhadap kemajuan zaman, persoalan tidak adanya jaringan internet akan menjadi masalah bagi mereka. Karena saat sekarang ini semua serba online, dan gadget tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari.

Dari hasil observasi penulis, memang listrik merupakan permasalahan utama dalam pelaksanaan program ini. Dan kebutuhan akan internet masih penulis temukan pada orang-orang tertentu saja.

Dalam menghadapi kendala atau permasalahan pelaksanaan program DBT, penulis ingin mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Kepala Desa Bokor mengatakan :

“ untuk mengatasi permasalahan listrik tersebut adalah menyediakan ginset. Mesin ginset akan disiapkan untuk kelancaran operasional kantor dan juga operasional program DBT. Sebelum adanya program DBT memang aktivitas kantor tetap berjalan dengan baik walaupun menggunakan mesin ginset. Meskipun mesin ginset tidak dinyalakan untuk waktu yang lama, tetapi setiap

kebutuhan akan listrik di kantor desa tetap akan sama, selain itu beliau juga mengatakan telah mengupayakan agar desa Bokor dipenuhi listrik 24 jam tanpa terputus. Dan saat ini ada kemajuan sedikit demi sedikit. Dan beliau juga akan memastikan secepatnya desa Bokor akan dipenuhi listrik 24 jam”. (21 Oktober 2019)

Yustami pandu desa mengatakan

“Kepala Desa telah menyediakan mesin ginset untuk keberlangsungan aktivitas kantor. Pembiayaan minyak untuk mesin ginset juga ada, sehingga untuk aktivitas kantor desa ataupun program DBT tidak terganggu. Kemudian permasalahan lainnya adalah ketika perangkat DBT rusak, jika salah satu dari perangkat rusak otomatis mempengaruhi operasional DBT. Menurutnya upaya yang tepat adalah dengan segera menghubungi teknisi yang ahli dibidangnya untuk memperbaiki terlebih dahulu perangkat yang rusak atau bermasalah tersebut. Jika sudah tidak bisa untuk diperbaiki, maka dari pihak desa akan segera menghubungi BP3TI yang telah menghibahkan perangkat tersebut untuk dapat ditukarkan atau diganti dengan perangkat baru”. (21 Oktober 2019)

Ketua Tim IT DBT mengatakan :

“dalam mengoperasikan system yang terpenting adalah konektivitas perangkat dengan listrik. Jika listrik tidak menyala pastinya perangkat juga tidak bisa dinyalakan. Menurutnya tindakan untuk menyalakan mesin ginset jika ingin perangkat menyala adalah suatu upaya yang cukup untuk menyelesaikan permasalahan listrik. Karena jika perangkat hanya dinyalakan saat listrik pln hidup yaitu sorehari, maka penggunaan internet akan sedikit. Sasaran kebutuhan akan internet adalah Pendidikan, pelayanan kantor, dan sisanya adalah kebutuhan masyarakat. Jadi menurutnya upaya tersebut cukup untuk dilakukan. Lalu beliau juga mengutarakan upaya untuk memberi edukasi kepada masyarakat akan internet juga penting dilakukan supaya ada sedikit keinginan untuk lebih maju dari pada sebelumnya. Namun upaya tersebut dilakukan secara berangsur”. (21 Oktober 2019)

Dari jawaban-jawaban informan yang penulis rangkum, maka dapat dilihat bahwa adanya upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan ataupun kendala dalam pelaksanaan Program Desa Broadband Terpadu di Desa Bokor. Upaya-upaya tersebut dilakukan bersama, agar aktivitas kantor desa dan program DBT tidak terbengkalai. Sejauh ini upaya yang dilakukan oleh Kepala Desa,

Pandu Desa, dan Tim IT DBT sudah cukup untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Namun berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan, selama penulis berada di desa tersebut, dalam keadaan listrik PLN yang tidak nyala penulis belum melihat sekalipun ginset dinyalakan sebagai upaya untuk menghidupkan listrik di kantor desa. Hal ini bertentangan dengan jawaban-jawaban yang penulis dapatkan.

Dapat disimpulkan bahwa, upaya yang dilakukan dalam proses pelaksanaan program Desa Broadband Terpadu bagi masyarakat disana sudah dinilai cukup untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Seperti yang dapat dilihat dari hasil wawancara penulis diatas. Namun berbeda dengan yang penulis amati keadaan lapangan secara langsung. Sehingga tidak bisa dikatakan bahwa upaya yang dilakukan tersebut berjalan.

Selanjutnya seperti yang dijelaskan oleh Pandu Desa, bahwa koordinasi dengan BP3TI dan PT. Metrasat harus tetap berjalan. Jika perangkat DBT bermasalah atau rusak pihak desa akan segera menghubungi BP3TI agar dapat ditukar atau diganti dengan yang baru. Dan jika jaringan yang mendapat masalah maka pihak desa akan segera menghubungi PT. Metrasat supaya segera mengirimkan teknisi mereka agar jaringan bisa kembali normal. Seperti yang diketahui bahwa program DBT ini adalah kerjasama antara Kominfo dengan pihak swasta.

**d. Pemerataan Program Desa Broadband Terpadu di Desa Bokor
Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti**

Pemerataan dalam penelitian ini yaitu apakah semua perangkat pendukung program Desa Broadband Terpadu yang ada di Desa Bokor dapat dinikmati dan dimanfaatkan secara merata oleh seluruh sasaran program.

Sebelum penulis mencari tahu apakah pemerataan dalam program DBT ini baik atau tidaknya, terlebih dahulu penulis melakukan wawancara kembali dengan informan berkaitan dengan apa saja fasilitas pendukung program yang dapat untuk masyarakat nikmati.

Kepala Desa Bokor H. Aminullah mengatakan:

”seluruh fasilitas program DBT sangat dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Contoh bentuk pemanfaatannya adalah sebagai fasilitas yang dapat dijadikan media promosi Desa. Bagi kepala desa tersebut, promosi desa bisa cepat berkembang karena adanya bantuan internet. Desa Bokor menjadi populer karena masyarakat desanya bisa menjadikan internet sebagai akses agar desa mereka lebih terkenal. Dengan memanfaatkan social media, youtube, blog, dan web desa. Desa Bokor terkenal dengan festival-festival dunia seperti : Fiesta Bokor Riviera, Bokor Folklore Festival, Lomba Lari Tual Sagu, Dan Pesta Buah Sungai Bokor 2015-2019.”. (21 Oktober 2019)

Ketua Tim IT DBT mengatakan :

“bahwa fasilitas pendukung program DBT adalah perangkat TIK, jaringan, dan website desa yang dihibahkan oleh kominfo melalui BP3TI. Semua perangkat tersebut digunakan sebagai penunjang operasional program. Yang bisa masyarakat nikmati adalah kebebasan dan kelancaran jaringan internet. Kecepatannya sekitar 2 Mbps untuk maksimal radius 50 M dari pusat Wifi (akses tetap) dan 1 Mbps untuk akses bergerak. Dan fasilitas lainnya yang bisa masyarakat nikmati adalah gazebo-gazebo yang sengaja dibangun disekitaran kantor desa sebagai tempat berkumpul masyarakat jika ingin mendapatkan kecepatan jaringan yang baik. Sementara perangkat TIK dan website desa yang mengoperasikan adalah Tim IT DBT Desa Bokor”. (21 Oktober 2019)

Menurut H. Abu Hasan salah satu tokoh masyarakat di Desa Bokor:

“Masyarakat dapat menikmati layanan jaringan internet. Jika ingin internet gratis bisa menggunakan wifi desa. Tetapi jika di ponsel masing-masing sudah memiliki paket data, sudah bisa dinikmati dari rumah masyarakat. Di Desa ini yang lancar jaringannya adalah Telkomsel. Banyak perubahan desa yang jauh dari desa Bokor sebelumnya. Terutama bagi anak-anak sekolah, jika ingin

mengerjakan tugas sudah tidak perlu ke warnet di Kota, melainkan di rumah masing-masing sudah bisa. Bagi pendatang yang sedang berkunjung ke desa juga tidak akan bosan karena keterbatasan jaringan”. (21 Oktober 2019)

Menurut Sopandi Ketua Sanggar Bathin Galang:

“Baginya semua masyarakat sudah dapat menikmati fasilitas-fasilitas dari adanya program DBT di Desa Bokor. Kemudahan akses internet merupakan fasilitas yang memang dituju untuk kebutuhan masyarakat. Baginya fasilitas yang memang diperuntukkan untuk masyarakat sudah sangat cukup untuk digunakan oleh masyarakat. Dan beliau juga mengutarakan bahwa selama ada jaringan internet desa, sanggar juga banyak mendapat kemajuan. Keberadaan program DBT sangat berpengaruh bagi desa dan masyarakat desa terlebih jika banyak pendatang dari luar yang berkunjung dalam event-event tertentu, masyarakat bisa mencari pendapatan dengan menjual kerajinan local, makanan khas, dan hasil kebun mereka. Karena mayoritas masyarakat disini memiliki kebun Durian, Manggis, rambutan sehingga Desa Bokor ini lebih di kenal sebagai desa wisata budaya dan buah. Bahkan setiap tahun akan diadakan pesta buah, yang dijuluki Pesta Buah Sungai Bokor”. (22 Oktober 2019)

Menurut Hamdani salah satu informan penulis bahwa ia menyatakan:

“Wifi desa adalah fasilitas yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Tetapi menurutnya memang yang akan menikmati fasilitas tersebut adalah usia-usia tertentu, seperti anak sekolah, pemuda, ataupun usia- 30-40 an. Tetapi pada dasarnya memang yang akan menggunakan internet dalam kehidupan sehari-hari adalah yang disebutkan diatas”. (22 Oktober 2019)

Pandangan lain dikemukakan oleh Ibu Emalia :

“Selaku tenaga pendidik, beliau mengakui sangat terbantu dengan adanya layanan internet desa tersebut. Saat ini guru-guru desa ataupun kota sudah dituntut untuk mampu mengoperasikan IT dan internet. Jadi baginya fasilitas berupa kebebasan internet ataupun wifi desa sangat bisa dinikmati masyarakat, anak-anak sekolah, tenaga pendidik, ataupun yang lainnya. Semakin hari Pendidikan akan semakin maju. Jika desa tidak dilengkapi dengan penunjang kemajuan tersebut, baginya Pendidikan antara anak-anak desa dengan Pendidikan anak-anak kota akan jauh sekali berbeda.”. (21 Oktober)

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pemerataan dalam Program Desa Broadband Terpadu di Desa Bokor ternilai baik. Sasaran program dapat memanfaatkan dan menikmati fasilitas program yang tersedia.

Secara keseluruhan semua fasilitas pendukung yang telah disediakan oleh kominfo, ataupun pihak swasta yang menghibahkan jaringan dapat dimanfaatkan secara baik oleh sasaran program yaitu masyarakat. Hal ini terbukti dengan hasil wawancara penulis dengan informan terkait yang keseluruhan menyatakan dapat menikmati seluruh fasilitas pendukung program DBT.

Fasilitas-fasilitas tersebut antara lain, perangkat TIK yang dapat dimanfaatkan untuk menjalankan operasional program oleh Tim IT DBT di Desa Bokor, wifi desa yang menjadi wifi gratis bagi masyarakat des ajika ingin menggunakan internet, akses internet desa yang berasal dari PT. Metrasat dan masyarakat hanya tinggal menyediakan paket data saja, maka internet akan memiliki konektivitas lancer karena sudah adanya tower pemancar jaringan, gazebo-gazebo yang terletak tidak jauh dari kantor desa yang dapat dijadikan tempat berkumpul masyarakat jika hendak menikmati layanan wifi desa (radius 50 m), layanan dari kepala desa, pandu desa, Tim IT ataupun perangkat desa lainnya yang akan memberikan edukasi seputar penggunaan internet agar dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat desa serta dapat mendorong kemajuan bagi desa, dan siap membantu masyarakat jika menghadapi kendala atau bahkan tidak mampu untuk mengoperasionalkannya.

Nilai manfaat dari adanya Program Des Broadband Terpadu bagi masyarakat Desa Bokor sangat banyak. Ada beberapa perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang semula tidak mengenali internet menjadi lebih mengenali internet. Termasuk Keberadaan Desa Bokor lebih dikenali dengan cepat oleh masyarakat luar. Sebagai contoh, potensi Desa Bokor adalah sector

perkebunan buah-buahan local, sagu, dan karet. Dengan keunggulan tersebut, masyarakat dapat memanfaatkan internet untuk memancing daya tarik wisatawan luar untuk dating berkunjung ke Desa Bokor, dan masyarakat dapat memanfaatkan momen itu untuk mencari penghasilan dengan menjual hasil kebun mereka. Setiap tahun, desa Bokor akan mengadakan Festival atau pesta buah pada saat musing buah tiba. Yang sering dinamakan dengan Pesta Buah Sungai Bokor. Dan dengan adanya akses internet, mereka bisa membuat promosi desa melalui media-media online, dan website desa sehingga apapun event yang ingin dibuat bisa tersampaikan informasinya dengan cepat.

Selain festival buah, Desa Bokor ikenal juga dengan lomba Lari Diatas Tual Sagu. Perlombaan ini menjadi budaya khas dari masyarakat Bokor. Perlombaan ini sudah dikenal wisatawan, karena merupakan salah satu perlombaan yang masuk dalam nominasi API (Anugrah Pesona Indonesia) 2019 kategori Olahraga Terpopuler di Indonesia oleh Kementrian Pariwisata RI, dan mandapat rekor Muri dari WBTB (Warisan Budaya Tak Benda) oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018.

**e. Responsivitas Program Desa Broadband Terpadu di Desa Bokor
Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti**

Responsivitas adalah bentuk tanggap dari sasaran program yang dapat dilihat berdasarkan keterlibatan sasaran program ataupun bentuk partisipasi sasaran program terhadap jalanya program Desa Broadband Terpadu yang dapat diwujudkan dengan adanya perubahan gaya hidup masyarakat.

Dengan adanya program DBT penulis ingin mengetahui apakah program tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat. Untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan tersebut, selanjutnya penulis melakukan wawancara mendalam dengan informan-informan yang bisa memberikan jawaban terkait hal diatas.

Menurut Yustami, selaku pandu desa :

“program DBT sangat memberikan pengaruh dalam kehidupan masyarakat di Desa Bokor. Terjadi banyak perubahan yang dapat dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Gaya hidup dan pola pikir mereka sebagai masyarakat juga cenderung menunjukkan perubahan. Menurutnya orientasi hidup dari masyarakat desa saat ini sudah cenderung maju, mungkin ada factor pengaruh dari internet”. (21 Oktober 2019)

Menurut Kepala Desa Bokor H. Aminullah :

“keberadaan program DBT sangat terasa memberikan pengaruh yang besar bagi masyarakat desa Bokor. Sebelum masuknya jaringan ke Desa Bokor, masyarakat memiliki keterbatasan untuk melakukan sosialisasi keluar desa, sulit berkomunikasi dengan kerabat yang tinggalnya jauh dari desa, susah untuk mendapatkan informasi-informasi penting yang datangnya dari luar desa, dan yang paling penting adalah keterbatasan masyarakat desa untuk melihat perkembangan kehidupan diluar desa. Tetapi setelah masuknya jaringan telepon, sudah mulai ada perubahan yang terjadi. Ditambah dengan adanya kebebasan akses internet yang membuat perubahan semakin terlihat. Dengan adanya program internet desa ini, seluruh masyarakat desa sudah memiliki kesempatan untuk menciptakan perubahan dalam kehidupan mereka. Desa memfasilitasi, dan masyarakat yang memanfaatkan fasilitas yang ada. Baginya program DBT sangat memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat dan kemajuan desa Bokor”. (21 Oktober 2019)

Menurut Abu Hasan sebagai salah satu Tokoh Masyarakat;

“beliau merasakan bahwa program DBT tersebut sangat memberikan pengaruh yang baik bagi kehidupan masyarakat. Baginya jika masyarakat desa mampu memanfaatkan internet desa yang telah disediakan oleh pemerintah, maka akan memberikan perubahan yang baik bagi kehidupan masyarakat itu sendiri. Dan selama program ini berjalan, beliau menilai bahwa mayoritas masyarakat dapat memanfaatkan dengan baik program tersebut.”. (21 Oktober 2019)

Dari hasil wawancara penulis diatas, maka dapat kita lihat bahwa secara keseluruhan dari masyarakat desa sangat menerima adanya program internet desa ini. Hal ini dapat diperkuat dengan adanya pernyataan yang menyatakan bahwa program DBT sangat memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan masyarakat desa. pengaruh yang dimaksud adalah masyarakat desa menyadari bahwa secara perlahan kehidupan mereka berubah setelah masuknya jaringan ke desa mereka. Hal ini juga diyakinkan oleh Kepala desa dan juga tokoh masyarakat. Bahwasanya terhadap roda kehidupan masyarakat desa, program ini sangat memberikan pengaruh. Kendati menurut penulis, bentuk perubahan yang terjadi memang belum dapat dikatakan sebagai perubahan hidup yang signifikan. Karena dari segi pemanfaatan, penulis menilai dari hasil observasi bahwa masyarakat baru sekedar menggunakan internet sebagai kebutuhan mereka. Namun tujuan dari program tersebut belum sepenuhnya dapat terwujud.

Lalu, ketika berbicara program DBT yang dimaksud dapat memberikan pengaruh dalam kehidupan masyarakat Desa Bokor, apakah bentuk pengaruh tersebut hanya ditunjukkan melalui adanya perubahan gaya hidup saja, maka dari itu penulis ingin lebih mengetahui sejauh mana pengaruh yang ditimbulkan dari adanya program tersebut. Penulis kembali melakukan wawancara kepada informan lainnya untuk menanyakan adakah peningkatan taraf hidup masyarakat desa Bokor setelah adanya program Desa Broadband Terpadu ini.

Menurut Kepala Desa Bokor H. Aminullah

“menurutnya program DBT ini sudah dirancang sedemikian rupa agar dapat memiliki nilai manfaat yang banyak jika diterapkan oleh masyarakat desa atau sasaran program. Terutama dari segi ekonomi. Program DBT dapat dimanfaatkan masyarakat Desa Bokor untuk meningkatkan perekonomian

mereka. Konektifitas internet akan memudahkan masyarakat desa untuk melakukan promosi secara online. Mayoritas masyarakat memiliki perkebunan sendiri. Dari hasil kebun mereka, masyarakat dapat memasarkannya melalui internet. Dan menurutnya setelah adanya internet, banyak yang berdatangan ke Desa Bokor ketika musim buah tiba. Hal ini disebabkan karena internet. Masyarakat awalnya mungkin hanya hobi memposting hasil kebun mereka di social media, tetapi hal tersebut justru menjadi rezeki bagi masyarakat itu sendiri. “. (21 Oktober 2019)

Dari sudut pandang masyarakat, Ibu Emalia mengatakan:

“beliau berpendapat bahwa dengan adanya internet, semua bisa dilakukan oleh masyarakat desa. Potensi Desa Bokor sangat banyak. Terutama sector pertanian dan perkebunan. Sector pariwisata juga merupakan sumber penghasilan bagi masyarakat desa Bokor. sehingga beliau juga menilai dengan adanya program DBT memang banyak hal yang harusnya bisa dilakukan masyarakat Desa Bokor agar dapat meningkatkan perekonomian mereka. Tetapi beliau menilai, bahwa tidak semua masyarakat desa yang mampu mengoperasikan internet itu sendiri. Sehingga untuk meningkatkan ekonomi sedikit lambat”. (21 Oktober 2019)

Menurut Sopandi ia berpendapat bahwa:

“dengan adanya program DBT di Desa Bokor, masyarakat dapat sedikit lebih mandiri. Berawal dari kesenangan untuk bermain internet, dan gaya hidup yang memang sudah modern akan menyebabkan ada perubahan yang bisa terjadi. Contohnya beliau menyatakan semenjak adanya akses internet di Desa Bokor, desa tersebut menjadi lebih populer dikalangan luar. memposting desa, kebudayaan desa, makanan khas, tempat-tempat bernilai sejarah atau tempat wisata, serta kearifan-kearifan local lainnya menjadi daya Tarik tersendiri untuk orang luar datang berkunjung ke Desa Bokor. Hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat desa bOkor untuk mencari penghasilan. Seperti menyediakan Homestay/penginapan, berjualan (apa saja yang memiliki nilai ekonomi), menawarkan jasa angkutan atau ojek kapal, ojek kendaraan bermotor dll.”. (22 Oktober 2019)

Secara keseluruhan, program DBT dinilai mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Bokor jika dapat digunakan dengan baik. Hasil wawancara penulis dengan Informan diatas menunjukkan bahwa masyarakat Desa Bokor telah memanfaatkan fasilitas program untuk mendapatkan penghasilan lebih. Dengan menggunakan internet sebagai media promosi terhadap kekayaan

Desa yang dimiliki sehingga dapat lebih mengenalkan Desa Bokor ke luar dan mampu menarik minat pendatang untuk berkunjung ke Desa Bokor. sehingga momen tersebut dimanfaatkan masyarakat desa untuk mendapatkan penghasilan misalnya dengan menyediakan penginapan bagi pengunjung dirumah-rumah warga lengkap dengan makan, menyediakan jasa angkutan berupa kapal/perahu, ojek, menjual bermacam barang yang memiliki nilai ekonomi.

Menyambung dari wawancara penulis sebelumnya, dapat dilihat bahwa banyak point positif yang dapat masyarakat rasakan ketika internet masuk ke Desa dan ketika program DBT tersebut berjalan. Lalu penulis ingin mengetahui secara jelas bahwa apakah hal tersebut dapat membuat atau menjadikan Desa Bokor menjadi lebih baik lagi atau tidak.

Ketua Tim IT DBT mengatakan :

“Desa Bokor jauh menjadi lebih baik dari pada keadaan yang sebelumnya. Perubahan pola dan gaya hidup, pemikiran, keinginan untuk menjadi lebih maju dapat ditunjukkan masyarakat. Hal tersebut jauh berbeda ketika desa belum tersentuh oleh jaringan internet dan program DBT. Saat sekarang ini Masyarakat menjadi lebih ingin maju. Hal ini diwujudkan dengan masyarakat menginginkan Pendidikan menjadi jauh lebih baik dari pada sebelumnya misalnya, rata-rata mereka menyekolahkan anak-anaknya sampai ke jenjang pendidikan Universitas. Melalui gadget, masyarakat sudah bisa mencari tau ilmu-ilmu tentang kesehatan. Sehingga dapat membentuk masyarakat yang lebih pintar dan maju.”. (21 Oktober 2019)

Menurut Hamdani sebagai masyarakat:

“beliau mengatakan bahwa memang saat sekarang ini Desa Bokor sudah jauh berubah. Banyak kemajuan yang terlihat. Bagi Hamdani, perubahan yang ada semenjak adanya program DBT adalah perubahan yang cenderung kearah yang lebih baik. Walaupun masyarakat belum semua yang memberikan respon akif terhadap adanya program, namun secara keseluruhan ia menilai bahwa program ini sangat berguna bagi desa dan juga untuk masyarakat Desa Bokor”. (22 Oktober 2019)

Menurut H. Abu Hasan :

“beliau mengatakan bahwa Desa Bokor banyak kemajuan setelah internet masuk ke desa. pola pikir masyarakat menjadi lebih luas sehingga membawa desa menjadi jauh lebih baik dari pada sebelumnya. Perubahan tersebut memang tidak langsung terjadi, tetapi sedikit demi sedikit sudah dapat dilihat. Hal ini membuktikan bahwa saat adanya program DBT keadaan Desa Bokor menjadi jauh lebih baik. Karena Program mendigitalkan desa tersebut sangat mendorong adanya perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat desa, terutama Desa Bokor”. (21 Oktober 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan masyarakat mengakui semenjak adanya program DBT banyak perubahan desa yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Perubahan tersebut tentunya adalah perubahan yang positif, sehingga masyarakat juga menjadi terbawa akan perubahan yang terjadi. Program DBT menjadikan desa Bokor menjadi jauh lebih baik dari pada Desa Bokor yang sebelumnya. Hal ini dikarenakan internet telah mendorong perubahan pada setiap elemen yang ada di Desa.

Berdasarkan hasil observasi penulis, penulis menemukan memang ada beberapa kelompok masyarakat yang telah terbiasa menggunakan internet dalam kehidupan sehari-hari mereka. Namun dalam penggunaan tersebut, masyarakat masih perlu untuk diberikan edukasi yang lebih banyak mengenai internet. Sehingga untuk memanfaatkan internet sebagai suatu cara agar taraf hidup bisa lebih meningkat dapat segera terwujud.

Dari hasil keseluruhan wawancara penulis terkait responsivitas masyarakat Desa Bokor terhadap adanya program Desa Broadband Terpadu, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa respon dari masyarakat desa Bokor terhadap Program sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya perubahan gaya hidup

masyarakat, pola pemikiran dan rasa keinginan untuk lebih baik dari pada sebelumnya, kesadaran akan pentingnya Pendidikan dan kesehatan, dan juga rasa kemandirian yang dapat masyarakat bangun karena adanya proram DBT tersebut.

Selain itu kemampuan untuk bersaing juga ditunjukkan masyarakat Desa Bokor. Dengan memanfaatkan fasilitas program DBT, masyarakat desa sangat gencar untuk mempromosikan desa mereka. Sehingga mampu mearik minat pendatang untuk berkunjung ke Desa Bokor. hal tersebut kemudian dimanfaatkan mereka untuk mencari penghasilan lebih.

f. Ketepatan Dalam Program Desa Broadband Terpadu di Desa Bokor Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti

Ketepatan adalah sesuatu yang dapat dinilai apakah suatu kebijakan atau program yang dijalankan telah sesuai dengan visi misi dan juga berdasarkan kemampuan dalam menjalankannya. Ketepatan yang dimaksud dalam program DBT adalah menilai apakah program yang dijalankan telah sesuai dengan visi misi dan juga kemampuan desa beserta masyarakat desa dalam menjalankan program tersebut.

Dalam melakukan suatu penilaian terhadap keberhasilan dari kebijakan atau keberhasilan dari program yang dibuat, tentunya alasan memilih daerah untuk menjalankan suatu kebijakan atau program tersebut menjadi salah satu point penting untuk dilihat. Kesanggupan desa dan masyarakat desa untuk menjalankan program membuat penluis tertarik untuk membahasnya kembali. Agar penilaian ini lebih sempurna, maka penulis ingin mengetahui apakah program ini tepat untuk dijalankan di Desa Bokor.

Menurut Kepala Desa Bokor H. Aminullah :

“ia menyatakan bahwa program DBT ini sangat tepat untuk terus dikembangkan. Karena kemampuan yang dimiliki oleh Desa Bokor untuk menjalankan program DBT ini sangat baik. Harapan beliau seluruh desa-desa yang ada di Indonesia dapat segera menerapkan program DBT ini sehingga desa bisa menjadi lebih maju dari segala aspek kehidupan”. (21 Oktober 2019)

Menurut Ketua Tim IT DBT :

“Pemerintah telah membuat kebijakan yang tepat untuk memberikan Program DBT di Desa Bokor. Masyarakat dituntut untuk mampu mengaplikasikan internet dalam kehidupan sehari-hari mereka. Walaupun awalnya sulit untuk membuat masyarakat desa terbiasa dengan internet, namun karena tuntutan zaman saat ini secara tidak langsung masyarakat akan terbawa-bawa oleh perkembangan zaman tersebut. Program DBT sangat tepat untuk menjadi salah satu cara agar masyarakat desa tidak lagi memiliki keterbatasan untuk berkembang dan maju.”. (21 Oktober 2019)

Yustami selaku Pandu desa berpendapat bahwa :

“program DBT sangat memiliki pengaruh yang besar terhadap kemajuan desa dan masyarakat Desa Bokor. Ketertinggalan yang selama ini dirasakan oleh desa dan masyarakat desa bisa diatasi dengan adanya internet. Program DBT adalah awal yang baik untuk menggeser paradigma masyarakat desa adalah masyarakat yang tertinggal. Baginya program ini adalah program yang tepat untuk mendorong kemajuan daerah”. (21 Oktober 2019)

Jawaban serupa juga dikemukakan oleh masyarakat yaitu Hamdani

“sebagai masyarakat beliau sangat mendukung agar program ini diterapkan di Desa Bokor. Dan ia berharap agar ada perubahan yang terjadi setelah adanya internet untuk desa. Walaupun sebagian masyarakat tidak begitu tahu dan paham mengenai visi dan misi dari program DBT ini, tetapi menurutnya masyarakat sangat terbantu dengan adanya program DBT yang ada di Desa Bokor.”. (22 Oktober 2019)

Dari jawaban diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Program DBT yang dijalankan di Desa Bokor memiliki tujuan yang baik untuk kemajuan desa. Dan Program ini sangat tepat untuk diterapkan di Desa Bokor. Langkah pemerintah untuk mengurangi kesenjangan digital di desa adalah langkah awal yang bijak. Karena masyarakat desa juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan

perhatian dari pemerintah. Mengenalkan internet kepada masyarakat dapat membentuk masyarakat yang cerdas dan mandiri. Hanya saja masyarakat perlu untuk diberikan edukasi yang baik mengenai pemanfaatan internet tersebut. Karena masyarakat desa merupakan sasaran dari program DBT yang juga dapat menentukan keberhasilan dari program tersebut. Lalu penulis ingin lebih mengetahui kemampuan desa yang dimaksud seperti apa, sehingga program ini dirasa tepat untuk diterapkan di Desa Bokor.

Menurut Ketua Tim IT DBT :

“Desa Bokor adalah desa yang letaknya paling luar dari Rangsang Barat, kemampuan desa yang dimaksud juga dilihat berdasarkan potensi-potensi yang ada di Desa Bokor. Kekayaan alam dan budaya yang dimiliki desa menjadi daya Tarik tersendiri bagi Desa Bokor. Dari sector pertanian dan perkebunan Desa Bokor dikenal dengan penghasil buah-buahan tropis seperti rambutan, durian, dan manggis. Selain buah-buahan tersebut ada lagi kebun masyarakat yang lainnya seperti manga, pisang, cempedak (nangka hutan) dan lain sebagainya. Hanya saja yang menjadikan Desa Bokor terkenal dengan Pesta Buahnya adalah buah-buahan musiman yaitu Rambutan, Durian, Manggis, dan Cempedak (nangka hutan). Keunggulan tersebut menjadi objek yang baik untuk dapat dipromosikan melalui internet. Sehingga dari sana masyarakat dapat meningkatkan perekonomian mereka. Dan pemanfaatan program DBT dapat terlaksana dengan baik”. (21 Oktober 2019)

Menurut Sopandi Ketua Sanggar Bathin Galang :

“Dari segi kemampuan, masyarakat dan juga desanya sendiri sangat mampu untuk menjalankan program tersebut. Ada banyak nilai ekonomi dari desa yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat desa. Internet sangat berpengaruh terhadap promosi desa. Selain itu, dengan program DBT ini perkembangan desa langsung bisa dilihat atau dipantau oleh kementerian komunikasi. Dalam program ini bahkan bukan hanya kementerian komunikasi yang terlibat pastinya ada kaitannya dengan kementerian desa, dan PDTT (Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi). Kekayaan ragam budaya, adat istiadat yang ada di Desa Bokor juga menjadi salah satu bukti bahwa Program DBT sangat tepat untuk dilaksanakan di Desa Bokor. (22 Oktober 2019)

Menurut H. Abu Hasan selaku tokoh masyarakat beliau menilai bahwa :

“kemampuan masyarakat untuk bisa menerima program DBT dengan baik, walaupun bentuk konkrit dari program itu sendiri tidak banyak yang mengetahui. Namun bentuk partisipasi masyarakat dengan mau memanfaatkan semua fasilitas program sangat membantu jalannya program DBT tersebut. Masyarakat memang membutuhkan internet saat sekarang ini. Selain itu, kesanggupan desa juga dinilai sangat baik. Desa memiliki banyak keunggulan yang dapat ditonjolkan ditambah dengan adanya internet”. (21 Oktober 2019)

Dari hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Desa Bokor sangat memiliki kemampuan untuk menjalankan program Desa Broadband Terpadu ini. Partisipasi masyarakat yang baik, ditunjukkan dengan bentuk pemanfaatan segala fasilitas dari program DBT tersebut. Ditambah dengan potensi desa yang sangat banyak, membuat program DBT ini sangat tepat untuk dijalankan di Desa Bokor. Selain itu program DBT ini juga harus disesuaikan dengan lokasi yang menjadi ketetapan syarat untuk program DBT, dimana Desa Bokor itu sendiri memenuhi syarat tersebut. Sasaran Program adalah desa-desa yang letaknya dipinggir atau terluar. Melihat lokasi Desa Bokor yang juga merupakan desa terujung dari Kecamatan Rangsang Barat. Dan letak desa yang juga jauh dari ibukota membuat Desa Bokor sangat perlu untuk diberi akses agar tidak menjadi desa yang tidak tersentuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

C. Hambatan-hambatan Program Desa Broadband Terpadu Di Desa Bokor Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.

Berdasarkan hasil Observasi dan wawancara penulis dengan sejumlah informan yang dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan Program Desa Broadband Terpadu yang ada di Desa Bokor Kecamatan Rangsang Barat

Kabupaten Kepulauan Meranti, maka penulis dapat menemukan beberapa hambatan yang timbul dalam pelaksanaannya yaitu :

1. Keterbatasan ketersediaan listrik PLN. Saat ini penerangan di Desa Bokor masih kurang. Karena penerangan listrik yang tidak full 24 jam. Sementara dalam pelaksanaan program DBT yang menggunakan perangkat seluruhnya memerlukan listrik. Sehingga untuk dapat mengoperasikan alat dan system tidak dapat maksimal.
2. Kesulitan untuk mengenalkan program kepada seluruh masyarakat. Karena sebagian masyarakat masih ada yang peduli dengan internet dan ada yang tidak. Pengaruh motif adat istiadat yang sangat melekat menjadi salah satunya sehingga rasa ingin tahu masyarakat tentang program masih kurang. Yang masyarakat hanya tahu adalah menggunakan internet secara umum saja tanpa ingin tahu untuk bagaimana meningkatkan ekonomi dengan memanfaatkan internet.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka pada bab ini penulis mengambil beberapa kesimpulan dan sebagai pelengkap penulis akan memberikan beberapa saran dan masukan yang dapat dijadikan pedoman bagi beberapa pihak yang memerlukan. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu:

1. Evaluasi dari Program Desa Broadband Terpadu yang dijalankan di Desa Bokor Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti sudah berjalan dengan baik tetapi masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya. Ditambah dengan salah satu tujuan dari program DBT tersebut belum tercapai sama sekali yaitu mengganti pola pelayanan manual menjadi pelayanan yang berbasis web. Kemudian tidak adanya sosialisasi program DBT kepada masyarakat desa. Sosialisasi hanya diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa saja. Padahal seharusnya sosialisasi diberikan kepada masyarakat desa sebagai salah satu sasaran program. Sehingga tidak semua dari masyarakat yang bisa memanfaatkan internet sesuai dengan tujuan program tersebut.
2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program masih ditemukan seperti ketersediaan listrik di Desa Bokor yang tidak tersedia 24 jam. Sementara untuk menjalankan program IT seperti program DBT ini memerlukan listrik yang harus full 24 jam. Karena DBT memerlukan penggunaan perangkat yang semuanya menggunakan listrik. Sehingga untuk

mengoperasionalkan alat dan system tidak bisa secara maksimal. Kendati dalam hambatan listrik tersebut, masih ada solusi yang dapat dilakukan oleh Kepala Desa ataupun Tim IT DBT sehingga program DBT tersebut masih bisa dijalankan walupun tidak maksimal. Kemudian hambatan selanjutnya yang dapat menyebabkan program DBT tidak dapat berjalan secara maksimal adalah kepekaan masyarakat terhadap internet masih belum rata. Ada sebagian masyarakat yang menganggap internet penting dalam kehidupan mereka, dan ada pula sebagian yang sama sekali tidak memperdulikan hal tersebut. Padahal sasaran program adalah masyarakat dimana masyarakat itu sendiri harusnya mampu menciptakan kehidupan yang lebih baik dengan adanya internet.

B. Saran

1. Sebaiknya perlu dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat desa tentang program DBT. Sosialisasi dapat membantu agar program ini bisa berjalan maksimal. Karena masyarakat masih belum semua mengetahui seperti apa program DBT itu dan bagaimana menjalankannya. Sosialisasi dapat dilakukan oleh pengusung program itu sendiri yaitu Kominfo ataupun dari pihak Pemerintah Desa Bokor.
2. Sebaiknya pemerintah Desa Bokor harus mengupayakan bagaimana agar Desa Bokor tidak lagi terkendala dengan ketersediaan listrik. Dan untuk pembiayaan operasional genset dapat menggunakan dana desa, sehingga dalam pelaksanaan program tidak lagi mendapatkan kendala. Dikarenakan

ada program yang berjalan harusnya Desa Bokor sudah memiliki penerangan listrik 24 jam.

3. Sebaiknya dari pihak Tim IT bersama Pandu Desa lebih memberikan edukasi terkait pemanfaatan internet kepada masyarakat. Sehingga masyarakat tidak hanya menggunakan internet hanya sebagai hoby saja, dan bermain social media, melainkan mampu menggunakan internet untuk memajukan kehidupan mereka. Karena sesuai dengan keinginan utama dari diadakannya program ini adalah untuk mempercepat perluasan dan peningkatan perekonomian masyarakat. Sehingga nilai guna dari internet harusnya mampu lebih luas tidak hanya lingkup social media, mencari informasi luar, dan promosi desa, tetapi juga dalam ruang lingkup perekonomian masyarakat. Agar masyarakat desa dapat lebih cerdas dan maju.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Bratakusumah, Deddy Supriady & Riyadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dunn, William, N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua (Terjemahan). Yogyakarta: PT. Gadjah Mada University Press.
- Dunn, William N. 2011. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta.
- Ndaraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1-2*. Jakarta: Renika Cipta.
- Nugroho, Riant D. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi*. Jakarta: PT. Elekmedia Komputindo.
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori Dan Praktis Pemerintah dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Widarsana.
- Mardikanto, T. 1993. *Penyuluhan Pembangunan Pertanian*. Surakarta. Sebelas Maret University, Press.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Musanef. 1999. *Sistem Pemerintahan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Rauf, Rahyunir. 2005. *Kelembagaan RT dan RW (Sejarah, Hakekat dan Prospek Kelembagaan, Pemerintah Kota Pekanbaru*. Riau.

- Saparin. 1986. *Tata Pemerintahan Dan Administrasi Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sedarmayanti. 2004. *Good Governance (Pemerintahan yang Baik)*. Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syafii'e, Inu Kencana. 2003. *System Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Syafii'e, Inu Kencana. 2007. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Sumbersari Indah.
- Wasistiono, Sadu. 2003. *Kapita Aeleka Manajemen Pemerintahan Daerah*. Bandung: Fokus Media
- Wasistiono, Sadu. 2007. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokus Media.
- Widjaya, H.A.W. 2002. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Widjaya, H.A.W. 2003. *Pemerintahan Desa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta. Raja Grafindo.
- Wrihatnolo, Rendy R dan Riant Nugroho D. 2006. *Manajemen Pembangunan Indonesia*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

DOKUMEN

Undang- Undang Dasar 1945

Undang-Undang No 23. Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Presiden RI No. 96 Tahun 2014 Tentang Rencana Pita Lebar

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 25 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika

Peraturan Kementrian Dalam Negeri No. 30 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa.

Peraturan Kementrian Dalam Negeri No. 56 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Kementrian Dalam Negeri No. 84 Tahun 2015

Peraturan Bupati Kepulauan Meranti No 08 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Surat Perjanjian Kerjasama Dirjen Penyelenggara Pos dan Informatika, KEMKOMINFO dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tentang Desa Broadband Terpadu Bagi Masyarakat di Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti

Surat Keputusan Kepala Desa No. 3 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Pengelola Website Desa Bokor

Surat Keputusan Kepala Desa No. 4 Tahun 2016 Tentang Penyuluh Desa Broadband Terpadu Desa Bokor

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2005-2025.

Humas BPPPTI, Kementrian Komunikasi dan Informatika 2015

Meilinia Diakonia Ginting *“Implementasi Desa Broadband Terpadu (Studi pada enam desa penerima Program Desa Terpadu di Daerah Perbatasan)”*. Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Medan. Jurnal PIKOM. Vol. 18 No. 1 Juni 2017.

Darman Fauzan Dhahir *“Pemanfaatan Program Desa Broadband Terpadu Oleh Masyarakat Desa Lutharato”*. Balai Besar Pengembangan SDM dan Penelitian Kominfo Makassar. Vol. 19 No. 2 Desember 2018.

Sunyoto Usman “*Pengembangan Desa Broadband Terpadu*”. Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Vol. 14 No. 3 September 2016.

Hilarion Hamjen “*Analisis Efektivitas Perangkat Pada Desa Broadband Terpadu*”. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya, Perangkat, dan Penyelenggaraan Pos dan Informatika. Vol. 14 No. 2 (2016) : 95-112.

“*Tata Kelola Desa Broadband Di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau*”. Vol. 5 No. 2 Desember 2016

